



# **DPMDPPKB**

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**



## **RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP) TAHUN 2025**



Jln. Setia Budi No. 200 Painan Kode Pos : 25611  
Telp. ( 0756) 21293 email : [dpmdppkbessel@gmail.com](mailto:dpmdppkbessel@gmail.com)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas karunianya dapat menyusun dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 yang telah berhasil disusun.

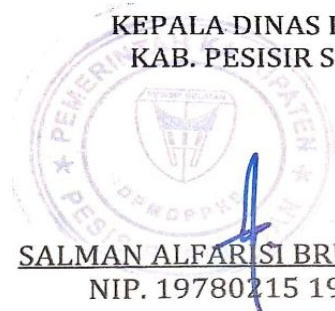
Berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah; yang menegaskan bahwa Perangkat Daerah setiap tahun diharuskan untuk menyusun dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Tahun 2025, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan telah merespon tersebut, sehingga dapat tersusun dengan baik.

Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) merupakan uraian tentang upaya Pemerintah Daerah untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran dengan menggunakan kebijakan dan prosedur untuk meminimalkan resiko, yang meliputi : upaya penguatan lingkungan pengendalian dan penguatan struktur, kebijakan dan prosedur organisasi untuk mengendalikan resiko tersebut, mengacu kepada 5 unsur pengendalian intern, yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, komunikasi, informasi dan pemantauan/monitoring. Informasi untuk mempersiapkan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) diperoleh dari hasil evaluasi, penilaian atau pemetaan atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang ada, dengan memperhatikan struktur dan praktek tata kelola organisasi.

Demikian disampaikan semoga penyusunan dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 dapat bermanfaat dan digunakan sebagai bahan evaluasi guna meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang berorientasi pada peningkatan kinerja.

Painan, 13 Maret 2025

KEPALA DINAS PMDPPKB  
KAB. PESISIR SELATAN



SALMAN ALFARISI BRUTU, S.STP., M.Si.  
NIP. 19780215 199802 1 001

## DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Dasar Hukum .....	2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	4
1.4. Ruang Lingkup .....	5
1.5. Sistematika Penulisan .....	5
BAB II PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN .....	7
2.1. Tujuan Terciptanya Lingkungan Pengendalian yang Baik .....	7
2.2. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat ini .....	7
2.3. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian .....	9
BAB III PENILAIAN RESIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP) .....	12
3.1. Penilaian Resiko .....	12
3.2. Resiko-Resiko .....	13
3.3. Kegiatan Pengendalian Terpasang .....	14
3.4. Kegiatan Pengendalian yang Masih Dibutuhkan .....	15
BAB IV RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI .....	16
BAB V RANCANGAN PEMANTAUAN .....	20
5.1. Pemantauan Berkelanjutan .....	20
5.2. Pemantauan/Evaluasi Terpisah .....	21
5.3. Pelaksanaan Tindak Lanjut .....	22
5.4. Pemantauan Atas Pelaksanaan RTP .....	22
BAB VI PENUTUP .....	23
LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Skoring Penilaian Terhadap Lingkungan Pengendalian Resiko	8
Tabel 2.2.	Penilaian Terhadap Lingkungan Pengendalian Resiko	9
Tabel 2.3.	Rencana Tindak Perbaikan/Penguatan Lingkungan Pengendalian Resiko	10

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Matriks Analisis Resiko, Skala Dampak dan Skala Kemungkinan Risiko 14

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah; maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan telah merespon tersebut dapat menyusun dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Tahun 2025 yang termasuk ke dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Pentingnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam suatu Organisasi Perangkat Daerah, yaitu : untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan. Ketika Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bagus, tentu saja penganggaran dan pelaksanaan bisa menghasilkan kualitas kinerja yang bagus. Kualitas kinerja berhubungan dengan berbagai hal, mulai dari keuangan, aset Daerah, efisiensi anggaran, hingga efektifitas waktu, sehingga program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah direncanakan dalam 1 tahun dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

Penyelenggaraan Pemerintahan tentu memiliki cakupan program, kegiatan dan sub kegiatan yang cukup banyak dan sangat luas, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pengawasan hingga evaluasi. Maka untuk dapat mewujudkan tata kelola penyelenggaraan Pemerintah yang baik, perlu membentuk suatu Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang dapat mengendalikan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan tersebut.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan suatu kebijakan berkaitan dengan sistem pengendalian yang harus dibuat oleh setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; yang mewajibkan kepada setiap pimpinan instansi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk meminimalkan resiko yang akan terjadi.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai lembaga penyelenggaraan Pemerintahan, menyadari sepenuhnya akan pentingnya penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan menyusun dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) didorong oleh kesadaran tersebut, maka secara berkelanjutan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Resiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) ditetapkan sebagai wujud pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara menyeluruh dalam penyelenggaraan tugas pokok Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan. Rencana Tindak Pengendalian (RTP) merupakan uraian mengenai rencana tindak (*action plan*) penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) baik dalam bentuk pembangunan, lingkungan, pengendalian maupun infrastruktur kebijakan pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga diharapkan dapat mendukung atas pencapaian tujuan, sasaran strategis, visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

## **1.2. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan Penggunaannya;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

13. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-500/K/2010 tentang Pedoman Pemetaan Terhadap Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-689/K/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian di Lingkungan Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 162 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 36 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) merupakan dokumen yang berisi gambaran dari efektifitas, struktur, kebijakan dan prosedur organisasi dalam mengendalikan resiko, perbaikan pengendalian yang ada serta mengkomunikasikan dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya. Dokumen ini merupakan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) atas pelaksanaan tugas pokok, sehingga diharapkan dapat memperoleh keyakinan memadai bahwa tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan ASN di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan, dalam rangka membangun pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/ penyimpangan atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan.

Manfaat Rencana Tindak Pengendalian (RTP) di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :

1. Memberikan arah dalam pengembangan SPIP secara menyeluruh sehingga terciptanya keterpaduan antara sub unsur SPIP dengan lingkungan pengendalian dalam aktivitas dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Menjadi dasar dalam membangun dan mengimplementasi pengendalian sebagai bagian dari penyelenggaraan SPIP;
3. Menjadi dokumentasi dalam penyelenggaraan SPIP dan pengukuran kemajuan penyelenggaraan SPIP, serta dasar pemantauan yang berkelanjutan;

#### **1.4. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup pelaksanaan melibatkan seluruh jajaran, yaitu : mulai dari pimpinan, ASN dan seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan. Rencana Tindak Pengendalian (RTP) ini berfokus kepada pengendalian atas kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

#### **1.5. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025, adalah sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini disajikan penjelasan latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, serta sistematika penulisan.

#### **BAB II PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN**

Pada bab ini menjelaskan tentang tujuan terciptanya lingkungan pengendalian yang baik, kondisi lingkungan pengendalian saat ini dan rencana perbaikan lingkungan pengendalian.

### **BAB III PENILAIAN RESIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)**

Pada bab ini diuraikan terkait penilaian risiko, resiko-risiko, kegiatan pengendalian terpasang dan kegiatan pengendalian yang masih dibutuhkan.

### **BAB IV RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

Pada bab ini disajikan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) terkait rancangan informasi dan komunikasi Perangkat Daerah.

### **BAB V RANCANGAN PEMANTAUAN**

Pada bab ini menjelaskan tentang pemantauan berkelanjutan, pemantauan/ evaluasi terpisah, pelaksanaan tindak lanjut dan pemantauan atas pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian (RTP).

### **BAB VI PENUTUP**

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dan langkah di masa yang akan datang untuk meminimalkan resiko yang akan terjadi serta untuk meningkatkan kinerjanya.

### **LAMPIRAN**

## **BAB II**

### **PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN**

#### **2.1. Tujuan Terciptanya Lingkungan Pengendalian yang Baik**

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Unsur dilingkungan pengendalian merupakan pondasi dari unsur pengendalian intern lainnya, sehingga unsur dilingkungan pengendalian memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Lingkungan pengendalian yang baik/buruknya menentukan keberhasilan/kegagalan penerapan unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) lainnya. Oleh karena itu, secara umum pembangunan dilingkungan pengendalian bertujuan untuk menciptakan atmosfer yang kondusif mendorong terimplementasinya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara efektif dan efisien dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.

Secara khusus, pembangunan pengendalian dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan bertujuan untuk, yaitu :

1. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
2. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
3. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
4. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
5. Terwujudnya aparat pengawasan intern Pemerintah yang berperan efektif;
6. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

#### **2.2. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat ini**

Satuan Tugas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan mengambil langkah strategis, yaitu :

1. Merekapitulasi evaluasi dilingkungan pengendalian pada seluruh lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan, yang terdiri dari : 1 Bagian (Sekretariat) dan 4 Bidang (Bidang Pemberdayaan Kelembagaan, Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya; Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pembangunan Kawasan Perdesaan; Bidang Pemerintahan Nagari serta Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) telah dilakukan pelaksanaan survey persepsi melalui kuesioner *Control Environment Evaluation (CEE)* tertuang dalam Rencana Tindak Pengendalian (RTP). Oleh karena itu, satuan tugas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) perlu melakukan rekapitulasi pada setiap bidang dan bagian sekretariat sesuai format pernyataan yang telah disediakan.
2. Melakukan skoring dengan fokus pada pernyataan sub unsur dilingkungan pengendalian, hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1. Skoring Penilaian Terhadap Lingkungan Pengendalian Resiko

No.	Skor	Keterangan
1.	1	Tidak Memadai
2.	2	Kurang Memadai
3.	3	Cukup Memadai
4.	4	Memadai

Sumber Data : Skoring Penilaian Tindak Pengendalian Resiko

3. Merumuskan rencana penguatan dilingkungan pengendalian pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan untuk menciptakan kondisi dilingkungan pengendalian yang kondusif, sehingga mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efektif dan efisien dari seluruh ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Berdasarkan hasil penilaian terhadap pengendalian dilingkungan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan, diperoleh gambaran yang tertuang pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.2. Penilaian Terhadap Lingkungan Pengendalian Resiko

No.	Sub Unsur	Kondisi
1.	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Memadai
2.	Komitmen terhadap Kompetensi	Kurang Memadai
3.	Kepemimpinan yang Kondusif	Kurang Memadai
4.	Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Kurang Memadai
5.	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang tepat	Memadai
6.	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia	Kurang Memadai
7.	Perwujudan Peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang Efektif	Memadai
8.	Hubungan Kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Memadai

Sumber Data : Rekapitulasi Hasil Kuesioner Penilaian Pengendalian Resiko

### 2.3. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian yang kondusif merupakan unsur paling penting dalam penerapan pengendalian intern. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan menginginkan terciptanya Lingkungan Pengendalian yang kondusif, sehingga mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efektif dan efisien dari seluruh ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Peningkatan kualitas perilaku dan tindakan tersebut diharapkan menjadi modal utama untuk menghasilkan aktivitas pengendalian yang handal guna mencapai tujuan organisasi. Hasil evaluasi atas kondisi dilingkungan pengendalian dirumuskan rencana penguatan dilingkungan pengendalian menunjukkan masih adanya kelemahan dilingkungan pengendalian yang perlu segera diperbaiki.

Atas kelemahan dilingkungan pengendalian saat ini, langkah perbaikan yang diperlukan dan merupakan prioritas untuk segera dilaksanakan, sebagai berikut :

Tabel 2.3. Rencana Tindak Perbaikan/Penguatan Lingkungan Pengendalian Resiko

No.	Sub Unsur	Rencana Tindak Perbaikan/ Penguatan Lingkungan Pengendalian Resiko
I.	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Menyusun kode etik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
		Mensosialisasikan kode etik tersebut ke seluruh pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.
		Menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur atau pelanggaran terhadap aturan kode etik.
II.	Komitmen terhadap Kompetensi	Menyusun standar kompetensi untuk setiap tugas pokok dan fungsi pada masing-masing posisi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.
		Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas pokok dan fungsi masing-masing posisi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.
		Menyelenggarakan pelatihan dan bimbingan teknis untuk membantu pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya.
III.	Struktur Organisasi yang sesuai dengan kebutuhan	Menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan (disesuaikan dengan tipologi SOTK Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan).
		Memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab pimpinan kepada masing-masing pejabat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.

No.	Sub Unsur	Rencana Tindak Perbaikan/ Penguatan Lingkungan Pengendalian Resiko
IV.	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab	Wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.
		Pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud diatas memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab yang diberikan terkait dengan pihak lain pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.
		Pegawai yang diberi wewenang tersebut diatas memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab terkait dengan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
V.	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia	Supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai.
		Memberikan prioritas pengembangan Sumber Daya Manusia pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan untuk menunjang kegiatan.
VI.	Perwujudan Peran Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah yang Efektif	Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektifitas terhadap pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.
		Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektifitas manajemen resiko dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.
		Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.
VII.	Hubungan kerjasama yang baik dengan instansi Pemerintah terkait	Mewujudkan dengan adanya mekanisme hubungan kerjasama yang baik antar instansi Pemerintah terkait dengan rapat koordinasi dan konsultasi antar SKPD serta adanya pemeriksaan rutin dari BPK pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.

Sumber Data : Rencana Tindak Perbaikan/Penguatan Pengendalian Resiko

## **BAB III**

### **PENILAIAN RESIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)**

#### **3.1. Penilaian Resiko**

Penilaian Resiko merupakan bagian integral dalam proses pengelolaan risiko, pengambilan keputusan pada tindakan dan kegiatan melalui tahapan identifikasi, analisis dan evaluasi terhadap resiko. Penilaian resiko merupakan pencerminan dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan. Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dimaksudkan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi tersebut.

Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan dalam pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pada Tahun 2025 Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang disusun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan dengan Visi Pemerintah Daerah Kab. Pesisir Selatan, yaitu : “Pesisir Selatan Maju, Tumbuh dan Berkelanjutan”, selanjutnya dari 5 Misi Pemerintah Daerah Kab. Pesisir Selatan tersebut, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan sesuai Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yang terdiri dari : Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, maka Misi yang ingin diwujudkan mengacu kepada Misi Nomor 1, 2, 4 dan 5, yaitu :

Misi 1. : Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas;

Misi 2. : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Berakhlak;

Misi 4. : Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Adil dan Inklusif;

Misi 5. : Mewujudkan Pesisir Selatan Lestari, Adaptif dan Tangguh Bencana.

Pada misi yang tertuang dalam Renstra tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan diprioritaskan untuk pembangunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mencapai tujuan, yaitu : “Meningkatkan Kualitas Pemerintahan Nagari dan Lembaga Kemasyarakatan serta Keluarga Berkualitas”.

### 3.2. Resiko-Resiko

Berdasarkan hasil penilaian yang telah dilakukan atas resiko mengancam pencapaian tujuan dari Misi Pemerintah Daerah Kab. Pesisir Selatan tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan, terdapat resiko-resiko yang menjadi prioritas untuk ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu :

Resiko Pencapaian Tujuan 1 :

- Kurang optimalnya Media Komunikasi dan Edukasi.

Resiko Pencapaian Tujuan 2 :

- Kurangnya Pasangan Usia Subur (PUS) ber-KB.

Resiko Pencapaian Tujuan 3 :

- Kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan operasional di Balai Penyuluh KB, Kelompok Kegiatan KB dan Institusi KB.

Resiko Pencapaian Tujuan 4 :

- Kurang optimalnya pergerakan pembinaan terpadu Kampung KB.

Resiko Pencapaian Tujuan 5:

- Akan berdampak kurangnya keluarga yang berkualitas.

Resiko Pencapaian Tujuan 6 :

- Kurang optimalnya pembinaan pembangunan kawasan perdesaan.

Resiko Pencapaian Tujuan 7 :

- Kurang optimalnya pelayanan Pemerintahan Nagari.

Resiko Pencapaian Tujuan 8 :

- Akan berdampaknya pada proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Nagari serta Kerapatan Adat Nagari.

Hasil analisis atas resiko-resiko yang dimaksud untuk memperlihatkan peta atau matriks resiko, sebagai berikut :

Gambar 3.1. Matriks Analisis Resiko, Skala Dampak dan Skala Kemungkinan Resiko

Matriks Analisis Resiko						
Matriks Analisis Resiko			Dampak/Konsekuensi			
			Tidak signifikan	Kurang Signifikan	Signifikan	Sangat signifikan
			1	2	3	4
Kemungkinan terjadinya Resiko	Hampir pasti	4				5, 6, 7, 8, 13, 14, 16, 17, 20, 21
	Kemungkinan besar	3		2	11, 12	18, 19, 22, 23
	Kemungkinan kecil	2		1, 4, 9, 10, 15, 24	3, 25	
	Sangat jarang	1				
		<b>Keterangan :</b>	<b>Sangat Rendah</b>	Resiko dapat diterima		
			<b>Rendah</b>	Resiko dapat diterima		
			<b>Tinggi</b>	Resiko Tidak dapat Diterima/Penanganan Selanjutnya		
			<b>Sangat Tinggi</b>	Resiko Tidak dapat Diterima/Penanganan Prioritas		

Sumber Data : Matriks Analisis Resiko, Skala Dampak dan Skala Kemungkinan Resiko

### 3.3. Kegiatan Pengendalian Terpasang

Sampai saat ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan telah membangun berbagai pengendalian resiko untuk mencapai tujuan pada misi yang diemban oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan. Beberapa pengendalian resiko tersebut dapat dinilai telah efektif, namun beberapa pengendalian resiko lainnya telah dilaksanakan tapi kurang/tidak efektif untuk mengatasi resiko tersebut dalam upaya pencapaian tujuan yang dimaksud. Maka kegiatan pengendalian yang telah dilakukan antara lain, sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

8. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa;
9. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota;
10. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal;
12. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB);
13. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota;
14. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB;
15. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;

#### **3.4. Kegiatan Pengendalian yang Masih Dibutuhkan**

Kegiatan pengendalian yang masih dibutuhkan tertuang dalam bentuk kebijakan dan sesuai dengan standar operasional prosedur terintegrasi dalam aktivitas Perangkat Daerah, khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan kegiatan pengendalian yang masih dibutuhkan, yaitu :

1. Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa;
2. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
3. Supervisi atau Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah;
4. Koordinasi dan Konsultasi dengan Perangkat Daerah terkait;
5. Penyediaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE);
6. Meningkatkan kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat;
7. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan dan Regulasi Pemerintahan Nagari;
8. Melaksanakan Pelayanan Keluarga Berencana secara optimal;
9. Melaksanakan SOP Pengadaan, Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

## **BAB IV**

### **RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

Rancangan Informasi dan Komunikasi yang dimaksud dalam menyusun dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) ini adalah informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka mendukung dilaksanakannya pengendalian resiko yang dibangun. Rancangan Informasi dan Komunikasi perlu diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan terkait dengan pengendalian resiko yang dibangun sesuai dengan kegiatan dan sub kegiatan untuk pelaksanaan pengendalian resiko terhadap Rencana Tindak Pengendalian (RTP) adalah, sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, yaitu :
  - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, yaitu :
  - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
  - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, yaitu :
  - a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD.
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah, yaitu :
  - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
  - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
  - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
  - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
  - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
  - f. Fasilitas Kunjungan Tamu;
  - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, yaitu :
  - a. Pengadaan Mebel.
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yaitu :
  - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
  - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yaitu :
  - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
  - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
  - c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
  - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
8. Fasilitasi Kerjasama Antar Desa, yaitu :
  - a. Pelaksanaan Kerjasama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota;
  - b. Pelaksanaan Pembinaan terhadap Pembangunan Kawasan Perdesaan;
  - c. Pelaksanaan Pembinaan terhadap Mahasiswa KKN dengan penempatan di Nagari, Kecamatan dan Kabupaten.
9. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, yaitu :
  - a. Pelaksanaan Penyediaan Pembayaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Wali Nagari dan Perangkat Nagari;
  - b. Pelaksanaan Sosialisasi dan Rapat Koordinasi terkait Regulasi tentang Desa dengan terlaksananya Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang Nagari) terhadap Perencanaan Pembangunan Nagari tersedianya Rencana Kerja Pemerintah (RKP Nagari) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Nagari);
  - c. Pelaksanaan Sosialisasi, Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi terhadap Pengelolaan Keuangan Nagari;
  - d. Pelaksanaan Pembinaan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB Nagari);
  - e. Pelaksanaan Pembinaan terhadap Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;
  - f. Pelaksanaan Pembinaan dan Pemberdayaan Badan Usaha Milik Nagari (BUM Nag) dan Lembaga Kerjasama Antar Nagari;
  - g. Pelaksanaan Rakor dengan Nagari terkait Penyusunan Profil Nagari tentang Indeks Desa Membangun (IDM);
  - h. Pelaksanaan Sosialisasi terkait Regulasi Nagari dan menyesuaikan dengan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku di Nagari tersebut;
  - i. Pelaksanaan Penyelesaian Manajemen Konflik di Pemerintahan Nagari;
  - j. Pelaksanaan Evaluasi terkait Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan.

10. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota, yaitu :
  - a. Pelaksanaan Pembinaan terhadap Kerapatan Adat Nagari (KAN);
  - b. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan terhadap Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), yaitu : PKK, Posyandu, LPM, Karang Taruna, LAD dan Masyarakat Hukum Adat;
  - c. Pelaksanaan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (UEM) dan Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD);
  - d. Pelaksanaan TMMD/Bulan Bhakti Gotong Royong dengan melibatkan Masyarakat;
  - e. Pelaksanaan Rakor Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga;
  - f. Pelaksanaan Sosialisasi, Pelatihan, Bimtek, Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi serta Studi Tiru/Banding untuk dapat diimplementasikan terhadap Lembaga Kemasyarakatan di Nagari.
11. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, yaitu :
  - a. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga;
  - b. Penyediaan Data dan Informasi Keluarga;
  - c. Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB.
12. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal, yaitu :
  - a. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana;
  - b. Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok);
  - c. Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang;
  - d. Advokasi Program Bangsa Kencana oleh Pokja Advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja;
  - e. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal;
  - f. Pengendalian Program Bangsa Kencana.

13. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB), yaitu :
  - a. Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB;
  - b. Pelaksanaan Rapat Koordinasi dengan BKKBN Perwakilan Provinsi Sumatera Barat untuk percepatan petunjuk operasional DAK Fisik BOKB dan DAK Non-Fisik BOKB.
14. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota, yaitu :
  - a. Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya;
  - b. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) terhadap Pelayanan MKJP (MOP, MOW, IUD dan Implant) di Kab. Pesisir Selatan;
  - c. Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya;
  - d. Pelaksanaan Rapat Koordinasi dengan BKKBN Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
15. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB, yaitu :
  - a. Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB;
  - b. Pembinaan Terpadu Kampung KB;
  - c. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas;
  - d. Pelaksanaan Pembinaan dan Monitoring di Balai Penyuluh KB;
  - e. Pelaksanaan Pembinaan dan Monitoring Kader KB;
  - f. Pelaksanaan Rapat Koordinasi dengan BKKBN Perwakilan Provinsi Sumatera Barat untuk percepatan petunjuk operasional DAK Fisik BOKB dan DAK Non-Fisik BOKB.
16. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, yaitu :
  - a. Pelaksanaan Pergerakan UPPKS dan PIK-R;
  - b. Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS);
  - c. Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS).
17. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, yaitu :
  - a. Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas.

## **BAB V**

### **RANCANGAN PEMANTAUAN**

Rancangan Pemantauan atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan pengendalian intern yang telah berjalan secara efektif dan efisien untuk mengatasi resiko dan tindak lanjut yang diperlukan untuk melaksanakan pengendalian resiko tersebut. Rancangan Pemantauan yang dilaksanakan, meliputi :

#### **5.1. Pemantauan Berkelanjutan**

Pemantauan berkelanjutan dilaksanakan atas pengendalian resiko sebagai kunci untuk meyakinkan bahwa pengendalian resiko tersebut dijalankan sebagaimana seharusnya. Pemantauan berkelanjutan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai pelaksana pemilik resiko yang akan melakukan pemantauan berkelanjutan tersebut. Pemantauan berkelanjutan ini dilaksanakan oleh Kepala Dinas pada setiap program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang dan bagian sesuai dengan uraian tugasnya masing-masing. Pemantauan berkelanjutan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan resiko yang ada meliputi, sebagai berikut :

1. Pemantauan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan yang ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Pemantauan dan Evaluasi atas penerapan Standar Kompetensi yang sesuai dengan penempatan Sumber Daya Manusia;
3. Pemantauan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Nagari;
4. Pemantauan Pengelolaan Keuangan dan APB Nagari;
5. Pemantauan Badan Usaha Milik Nagari (BUM Nag) dan Lembaga Kerjasama Antar Nagari;
6. Pemantauan Profil Nagari tentang Indeks Desa Membangun (IDM);
7. Pemantauan Penyelesaian Manajemen Konflik di Pemerintahan Nagari;
8. Pemantauan Evaluasi terkait Perkembangan Nagari;
9. Pemantauan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD);

10. Pemantauan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (UEM) dan Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD);
11. Pemantauan Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga;
12. Pemantauan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Informasi Keluarga;
13. Pemantauan Penyediaan Media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi terhadap Media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tersebut;
14. Pemantauan Pengendalian Program Bangga Kencana;
15. Pemantauan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB);
16. Pemantauan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan serta Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) terhadap Pelayanan MKJP (MOP, MOW, IUD dan Implant) di Kab. Pesisir Selatan;
17. Pemantauan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB;
18. Pemantauan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

Selanjutnya pemantauan berkelanjutan terhadap serapan atau realisasi belanja pelaksanaan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.

## **5.2. Pemantauan/Evaluasi Terpisah**

Pemantauan/Evaluasi Terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan selaku Auditor Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dari seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan atau oleh pihak terkait dari BPKP. Selanjutnya pemantauan/evaluasi terpisah bertujuan untuk meyakinkan pengendalian intern yang dirancang telah berjalan secara efektif dan efisien.

### **5.3. Pelaksanaan Tindak Lanjut**

Pelaksanaan tindak lanjut sebagai bagian dari penyelenggaraan dan perbaikan dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) atas setiap rekomendasi hasil audit, evaluasi, review dari auditor eksternal maupun internal, dari setiap unit kerja SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang telah melaksanakan tindak lanjut tersebut.

### **5.4. Pemantauan Atas Pelaksanaan RTP**

Pemantauan atas pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) pada setiap SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang telah memberikan laporan atas Rencana Tindak Pengendalian (RTP) sesuai dengan tanggungjawabnya secara berkala kepada Tim Pemantau yang dalam hal ini adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil dari pemantauan atas pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) bersama Tim akan dilaporkan kepada Bupati Pesisir Selatan.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 merupakan salah satu dokumen penting dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Dalam rangka mewujudkan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui program, kegiatan dan sub kegiatan yang efektif dan efisien, serta keandalan dalam pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemantauan atas pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) ini akan menjadi dasar pertimbangan pembuatan *Statement of Responsibility* atau Pernyataan Tanggung Jawab dalam menyampaikan laporan keuangan.

Painan, 13 Maret 2025

KEPALA DINAS PMDPPKB  
KAB. PESISIR SELATAN



SALMAN ALFARISI BRUTU, S.STP., M.Si.  
NIP. 19780215 199802 1 001



# **DPMDPPKB**

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**



## **LAMPIRAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP) TAHUN 2025**



REKAPITULASI HASIL KUESIONER PENILAIAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE)  
 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN

Tahun Penilaian : 2025

NO.	PERTANYAAN / KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)																																	SIMPULAN KUOSIONER CEE					
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33		R34	R35	R36	Modus	
a	b	c																																	d					
<b>A. PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA</b>																																			<b>MEMADAI</b>					
1	Pegawai mendapatkan pesan integritas & nilai etika secara rutin dari pimpinan instansi (Misalnya keteladanan, pesan moral dll)	3	3	2	3	3	4	2	2	3	2	3	3	4	2	4	2	2	4	2	3	2	3	2	2	2	3	2	2	3	3	3	3	4	4	2	4	3	Memadai	
2	Pemda telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	4	2	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	2	3	3	3	2	3	4	4	2	4	3	Memadai		
3	Telah terdapat fungsi khusus di dalam instansi yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik	2	3	3	3	2	3	4	1	3	2	3	3	2	2	3	2	2	3	3	3	4	3	2	4	2	3	2	3	4	3	2	3	3	4	2	2	3	Memadai	
4	Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku	2	3	2	3	3	3	4	2	2	2	3	3	3	3	4	2	2	3	3	3	4	3	3	3	3	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Memadai	
<b>B. KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI</b>																																			<b>KURANG MEMADAI</b>					
1	Standar kompetensi setiap pegawai/posisi jabatan telah ditentukan	3	3	3	3	3	3	2	1	2	2	3	3	3	2	4	3	2	2	3	3	4	2	2	3	2	3	2	2	3	3	3	3	3	2	4	3	Memadai		
2	Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan	1	3	3	2	2	2	2	1	2	2	2	2	3	2	3	3	2	3	2	3	4	2	2	2	2	2	2	3	2	3	2	3	3	3	1	3	2	Kurang Memadai	
3	Pemda telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai	2	2	3	2	3	2	3	3	2	2	2	3	3	2	4	2	2	3	2	3	4	2	2	2	2	2	2	3	2	1	2	2	3	3	1	4	2	Kurang Memadai	
4	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala	2	3	3	2	3	2	2	2	2	3	2	2	3	1	2	1	1	3	4	3	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	4	1	4	2	Kurang Memadai		
<b>C. KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF</b>																																			<b>KURANG MEMADAI</b>					
1	Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko	2	2	3	3	2	2	2	2	1	2	2	3	3	2	3	1	2	3	2	3	2	2	2	2	2	2	2	3	3	1	2	2	4	3	2	4	2	Kurang Memadai	
2	Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan	2	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2	3	3	2	4	1	2	3	2	3	3	2	3	2	2	2	2	3	3	2	2	3	3	3	2	3	2	Kurang Memadai	
3	Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/menggal pelaporan risiko/masalah	2	3	3	3	3	2	3	2	3	2	3	3	3	3	4	2	2	3	2	3	3	3	3	2	3	2	3	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
4	Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja	2	4	3	3	3	4	2	1	3	2	3	3	3	3	4	1	2	3	2	3	2	2	4	2	3	3	2	3	3	2	3	3	3	4	3	3	3	Memadai	
5	Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras dengan visi dan misi Pemda	2	4	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	2	3	4	3	3	4	3	4	2	3	2	2	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	Memadai	
6	Rencana/sasaran strategis pemda telah dijabarkan ke dalam sasaran OPD dan tingkat operasioanl OPD (cascading)	3	4	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	3	3	4	3	4	3	3	4	2	3	4	4	3	3	4	3	4	4	3	Memadai	
7	Rencana strategis dan rencana kerja pemda telah menyajikan informasi mengenai risiko	3	2	3	2	2	3	4	3	2	3	3	3	3	2	4	1	2	3	2	3	4	3	2	3	2	2	2	3	2	4	2	3	4	3	3	4	3	Memadai	
8	Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses pengelolaan risiko	2	3	3	2	2	2	4	2	2	3	3	3	3	2	3	1	2	3	1	3	3	3	3	2	2	2	2	3	2	2	2	3	4	3	4	4	2	Kurang Memadai	

NO.	PERTANYAAN / KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)																														SIMPULAN KUOSIONER CEE								
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30		R31	R32	R33	R34	R35	R36	Modus	
a	b	c																														d								
<b>D PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN</b>																																<b>KURANG MEMADAI</b>								
1	Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh OPD dan unit kerja yang tepat	2	3	3	3	3	2	2	3	2	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	2	3	4	2	4	3	4	3	3	4	3	4	3	3	Memadai		
2	Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	2	3	3	2	2	3	2	3	2	2	3	2	3	2	4	2	2	3	2	3	3	3	3	2	3	4	2	4	2	3	4	3	4	4	4	2	Kurang Memadai		
3	Pegawai yang bertugas di OPD merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat adhoc (sementara)	3	2	3	3	2	3	2	3	3	3	3	2	3	1	3	3	3	4	4	3	2	3	3	3	2	4	2	3	2	3	3	3	4	4	3	4	3	Memadai	
4	Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	1	2	3	3	2	2	3	3	3	2	3	3	2	3	2	2	4	2	3	2	3	3	1	2	3	2	3	2	3	3	3	4	4	2	4	2	Kurang Memadai		
<b>E PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT</b>																																<b>MEMADAI</b>								
1	Kriteria penndelegasian wewenang telah ditentukan dengan tepat	3	2	3	3	3	2	4	2	3	2	3	3	2	4	3	3	4	2	3	4	3	3	2	3	2	2	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	Memadai		
2	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat	3	2	3	3	3	2	3	2	3	2	3	3	2	4	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	2	2	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	Memadai		
3	Kewenangan direviu secara periodik	3	2	3	3	3	2	2	2	2	2	2	3	3	2	4	2	2	3	1	3	3	3	3	2	3	2	2	3	3	3	3	4	4	2	3	3	Memadai		
<b>F PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>																																<b>KURANG MEMADAI</b>								
1	Pemda telah memiliki Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai)	3	3	3	3	3	4	3	3	3	2	3	3	3	4	3	2	4	3	3	4	4	2	3	3	2	2	4	3	4	3	3	4	3	2	4	3	Memadai		
2	Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik	3	3	3	3	3	1	4	2	2	2	2	2	3	2	4	3	2	2	3	3	3	2	2	2	2	2	2	3	2	4	2	3	4	3	2	3	3	Memadai	
3	Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja	1	2	3	3	4	1	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	2	1	3	4	2	2	2	2	2	2	3	2	4	3	2	4	3	2	3	1	Kurang Memadai	
4	Pemda telah menginternalisasi budaya sadar risiko	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	3	2	4	1	2	3	1	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	4	3	2	3	2	Kurang Memadai
5	Adanya pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)	1	1	3	3	2	2	2	2	3	2	2	4	3	2	3	1	1	2	1	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	2	3	1	Kurang Memadai	
6	Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan	4	3	3	3	4	2	2	3	3	3	2	3	3	3	4	3	2	4	1	3	4	2	2	2	2	2	2	2	3	2	4	3	2	4	3	3	4	3	Memadai
7	Instansi telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM	2	3	3	2	2	1	2	2	2	2	2	2	3	3	4	2	2	3	1	3	3	2	2	1	2	2	2	2	1	2	1	3	3	2	3	2	Kurang Memadai		
<b>G PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG EFEKTIF</b>																																<b>MEMADAI</b>								
1	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas efisiensi/ efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program Secara periodik	3	2	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	4	3	3	4	3	3	4	4	3	1	3	4	2	3	3	4	2	2	4	4	3	4	3	Memadai	
2	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya	4	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	4	4	3	2	3	2	3	3	3	4	2	3	4	4	4	4	4	3	Memadai
3	Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP	4	2	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	2	4	2	3	2	3	3	4	3	2	2	3	4	3	3	3	4	3	2	4	4	4	4	3	Memadai	
4	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis resiko.	4	3	3	2	3	2	3	3	2	4	3	4	3	3	4	3	3	4	2	3	4	4	2	4	3	2	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	3	Memadai	
5	Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti	4	2	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	2	4	3	3	4	3	3	4	4	3	4	3	4	3	3	3	4	2	3	4	4	4	3	3	Memadai	

NO.	PERTANYAAN / KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)																												SIMPULAN KUOSIONER CEE								
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28		R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36
a	b	c																												d								
H	HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT																													MEMADAI								
1	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	2	2	3	3	4	3	3	4	4	4	4	3	Memadai
2	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/peemriksaan (inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun	4	3	3	3	3	2	4	4	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	4	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	3	Memadai	

Keterangan:

Kolom c diisi dengan jawaban responden

Ket Jawaban:

- 1 Tidak Setuju/Belum ada/ belum dibangun
- 2 Kurang Setuju/Telah dibangun/diterapkan, akan tetapi belum konsisten
- 3 Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik, tapi m
- 4 Sangat Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik dan dapat ditularkan ke organisasi lain

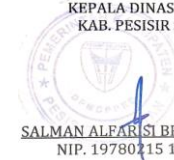
Kolom d diisi dengan simpulan hasil penilaian lingkungan pengendalian tiap pertanyaan dan kesimpulan tiap sub unsur lingkungan pengendalian

Misal: kesimpulan tiap pertanyaan : "Memadai", apabila modus jawaban responden adalah 3 atau 4 dan "Kurang Memadai" apabila modus jawaban responden adalah 1 atau 2

kesimpulan sub unsur lingkungan pengendalian: "Memadai", apabila seluruh simpulan tiap pertanyaan pada sub unsur tersebut telah "memadai, dan "kurang memadai" apabila terdapat simpulan pertanyaan pada sub unsur tersebut yang "Kurang Memadai"

Painan, 13 Maret 2025

KEPALA DINAS PMDPPKB  
KAB. PESISIR SELATAN



SALMAN ALFARISI BRUTU, S.STP., M.Si.  
NIP. 19780215 199802 1 001

**CEE Berdasarkan Dokumen**  
**Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern**  
**di Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan**

Nama Pemda	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan		
Tahun Penilaian	: 2025		
No.	Sumber data	Uraian Kelemahan	Klasifikasi
a	b	c	d
1	Data Kepegawaian	Masih adanya Pegawai yang ditempatkan belum sesuai dengan kompetensi dan pengalaman	Komitmen terhadap kompetensi
		Adanya SDM pada DPMDPPKB yang belum diklat sesuai kompetensi	Komitmen terhadap kompetensi
2	Data Administrasi Pemerintahan	Pimpinan belum menetapkan kebijakan pengelolaan resiko	Kepemimpinan yang kondusif
		Pimpinan belum secara intens dan berkala menerapkan pengelolaan resiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan	Kepemimpinan yang kondusif
		Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan namun belum sepenuhnya memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan resiko	Pembentukan Struktur Organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
3	Data Belanja Pegawai	Insentif pegawai belum sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja karena keterbatasan anggaran	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia
4	Data Belanja Daerah	Instansi belum mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM	

\*) Klasifikasi permasalahan menggunakan sub unsur Lingkungan Pengendalian dalam PP 60 Tahun 2008.

Keterangan :

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan sumber data

Kolom c diisi dengan uraian kelemahan jika berdasarkan data yang ada merupakan kelemahan, atau

Kolom d diisi dengan klasifikasi kelemahan sesuai sub unsur pada lingkungan pengendalian

Painan, 13 Maret 2025

KEPALA DINAS PMDPPKB  
KAB. PESISIR SELATAN



SALMAN ALFAR SI BRUTU, S.STP., M.Si.  
NIP. 19780215 199802 1 001

**Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern  
Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan**

Nama Pemda Tahun Penilaian		: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan : 2025					
No.	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Penegakan integritas dan nilai etika	MEMADAI		MEMADAI		MEMADAI	
2	Komitmen terhadap kompetensi	KURANG MEMADAI	Masih adanya Pegawai yang ditempatkan belum sesuai dengan kompetensi dan pengalaman	KURANG MEMADAI	Meskipun belum sesuai kompetensi dan pengalaman, pegawai diberikan pengetahuan sambil melaksanakan kegiatan dan di asistensi oleh pejabat yang berpengalaman dalam bidang bersangkutan	KURANG MEMADAI	Meskipun belum sesuai kompetensi dan pengalaman, pegawai diberikan pengetahuan sambil melaksanakan kegiatan dan di asistensi oleh pejabat yang berpengalaman dalam bidang bersangkutan
			Adanya SDM pada DPMDPPKB yang belum diklat sesuai kompetensi		Terdapat SDM yang belum diklat kompetensi karena keterbatasan anggaran		Terdapat SDM yang belum diklat kompetensi karena keterbatasan anggaran
3	Kepemimpinan yang kondusif	KURANG MEMADAI	Pimpinan belum menetapkan kebijakan pengelolaan resiko	KURANG MEMADAI	Secara lisan Pimpinan telah memberikan arahan terkait pengelolaan resiko	KURANG MEMADAI	Secara lisan Pimpinan telah memberikan arahan terkait pengelolaan resiko
			Pimpinan belum secara intens dan berkala menerapkan pengelolaan resiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan		Pimpinan memberikan arahan secara rutin dalam apel namun belum secara terformat dan berdasarkan dokumen SOP		Pimpinan memberikan arahan secara rutin dalam apel namun belum secara terformat dan berdasarkan dokumen SOP
4	Pembentukan Struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan	KURANG MEMADAI	Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan namun belum sepenuhnya memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan resiko	KURANG MEMADAI	Masing-masing pihak belum sepenuhnya memahami peran dan tanggungjawab dalam pengelolaan resiko	KURANG MEMADAI	Masing-masing pihak belum sepenuhnya memahami peran dan tanggungjawab dalam pengelolaan resiko
5	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat	MEMADAI		MEMADAI			
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	KURANG MEMADAI	Insentif pegawai belum sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja karena keterbatasan anggaran	KURANG MEMADAI	Insentif pegawai belum sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja karena keterbatasan anggaran	KURANG MEMADAI	Insentif pegawai belum sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja karena keterbatasan anggaran
			Instansi belum mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM		Instansi belum mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM		Instansi belum mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM

No.	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
a	b	c	d	e	f	g	h
7	Perwujudan peran APIP yang efektif	MEMADAI		MEMADAI			
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	MEMADAI		MEMADAI			

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan sub unsur pada lingkungan pengendalian

Kolom c diisi dengan simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen

Kolom d diisi dengan uraian simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen

Kolom e diisi dengan simpulan hasil survei persepsi

Kolom f diisi dengan uraian simpulan sesuai hasil survei persepsi

Kolom g diisi dengan simpulan sesuai hasil penilaian awal dan survei persepsi, jika hasil antara penilaian awal dan survei persepsi bertentangan, maka lakukan pendalaman atau lakukan professional judgement untuk menyimpulkannya

Kolom h diisi dengan uraian kelemahan

Painan, 13 Maret 2025

**KEPALA DINAS PMDPPKB  
KAB. PESISIR SELATAN**



**SALMAN ALFARISI BRUTU, S.STP., M.Si.**  
NIP. 19780215 199802 1 001

**PENETAPAN KONTEKS RESIKO STRATEGIS**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**  
**KABUPATEN PESIRIS SELATAN**

Nama Pemda	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Penilaian	: 2025
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2025-2029
Sumber Data	RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029
Visi	Pesisir Selatan Maju, Tumbuh dan Berkelanjutan
Misi Strategis RPJMD	1. Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas; 2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Berakhlak; 4. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Adil dan Inklusif; 5. Mewujudkan Pesisir Selatan Lestari, Adaptif dan Tangguh Bencana.
Penetapan konteks Misi Resiko Strategis Pemda	1. Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas; 2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Berakhlak; 4. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Adil dan Inklusif; 5. Mewujudkan Pesisir Selatan Lestari, Adaptif dan Tangguh Bencana.
Tujuan Strategis RPJMD	Tujuan 1.1. Terwujudnya Birokrasi yang Efisien, Adil dan Berkinerja Tinggi Tujuan 2.1. Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Unggul Tujuan 4.1. Terwujudnya Ketahanan Sosial dan Budaya Tujuan 5.1. Meningkatnya Resiliensi Daerah terhadap Bencana dan Perubahan Iklim
Penetapan Konteks Tujuan Resiko Strategis Pemda	Tujuan 1.1. Terwujudnya Birokrasi yang Efisien, Adil dan Berkinerja Tinggi Tujuan 2.1. Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Unggul Tujuan 4.1. Terwujudnya Ketahanan Sosial dan Budaya Tujuan 5.1. Meningkatnya Resiliensi Daerah terhadap Bencana dan Perubahan Iklim
Sasaran RPJMD	Sasaran 1.1.2. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Berdaya Saing Sasaran 1.1.3. Meningkatnya Kapasitas Aparatur Birokrasi Sasaran 2.1.2. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Sasaran 4.1.1. Meningkatnya Keharmonisan Sosial Berbasis Keluarga Sasaran 4.1.3. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Nagari Sasaran 5.1.3. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Upaya Pengurangan Resiko Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim
Penetapan Konteks Sasaran Resiko Strategis Pemda	Sasaran 1.1.2. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Berdaya Saing Sasaran 1.1.3. Meningkatnya Kapasitas Aparatur Birokrasi Sasaran 2.1.2. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Sasaran 4.1.1. Meningkatnya Keharmonisan Sosial Berbasis Keluarga Sasaran 4.1.3. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Nagari Sasaran 5.1.3. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Upaya Pengurangan Resiko Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim
IKU Sasaran RPJMD	Meningkatkan Kualitas Pemerintahan Nagari dan Lembaga Kemasyarakatan serta Keluarga Berkualitas
Penetapan konteks IKU Risiko Strategis Pemda	Meningkatkan Kualitas Pemerintahan Nagari dan Lembaga Kemasyarakatan serta Keluarga Berkualitas
Prioritas pembangunan dan program unggulan	Program Administrasi Pemerintahan Desa Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
Urusan Pemerintahan Daerah	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Nama Dinas Terkait	Bapedalitbang, Diskominfo, DPMPSTP, Disdukcapil, Disdikbud, Dinsos, BPBD, DPUTR, DPerkimtanLH, DPertanian, Dinas Perikanan dan Pangan, Dinas Kaperindag, Dinas Kertrans, Dinkes, RSUD, P3MD/TA
Tujuan, Sasaran, IKU, dan Program yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan 1.1. Terwujudnya Birokrasi yang Efisien, Adil dan Berkinerja Tinggi Tujuan 2.1. Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Unggul Tujuan 4.1. Terwujudnya Ketahanan Sosial dan Budaya Tujuan 5.1. Meningkatnya Resiliensi Daerah terhadap Bencana dan Perubahan Iklim Sasaran 1.1.2. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Berdaya Saing Sasaran 1.1.3. Meningkatnya Kapasitas Aparatur Birokrasi Sasaran 2.1.2. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Sasaran 4.1.1. Meningkatnya Keharmonisan Sosial Berbasis Keluarga Sasaran 4.1.3. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Nagari Sasaran 5.1.3. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Upaya Pengurangan Resiko Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim IKU Sasaran Meningkatkan Kualitas Pemerintahan Nagari dan Lembaga Kemasyarakatan serta Keluarga Berkualitas Program Administrasi Pemerintahan Desa Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Painan, 13 Maret 2025

**KEPALA DINAS PMDPPKB**  
**KAB. PESIRIS SELATAN**



**SALMAN ALFARISI BRUTU, S.STP., M.Si.**  
NIP. 19780115 199802 1 001

**PENETAPAN KONTEKS RESIKO STRATEGIS**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan	
Tahun Penilaian	: 2025	
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2025-2029	
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
OPD yang Dinilai	: Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	
Sumber Data	Rancangan Awal Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	
Tujuan Strategis	Tujuan 1.1. Terwujudnya Birokrasi yang Efisien, Adil dan Berkinerja Tinggi Tujuan 2.1. Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Unggul Tujuan 4.1. Terwujudnya Ketahanan Sosial dan Budaya Tujuan 5.1. Meningkatnya Resiliensi Daerah terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	
Sasaran Strategis	1. Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja; 2. Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah; 3. Terwujudnya Keluarga Bahagia.	
IKU Renstra OPD	<b>IKU</b>	<b>2025</b>
	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A (81)
	Persentase Nagari Mandiri	31%
	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	80
	Indeks Pembangunan Keluarga	61
Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Pemerintahan Desa Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Pengendalian Penduduk Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan Strategis : - Terwujudnya Birokrasi yang Efisien, Adil dan Berkinerja Tinggi; - Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Unggul; - Terwujudnya Ketahanan Sosial dan Budaya; - Meningkatnya Resiliensi Daerah terhadap Bencana dan Perubahan Iklim. Sasaran Strategis : Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja; Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah; Terwujudnya Keluarga Bahagia. IKU : Nilai AKIP Perangkat Daerah; Persentase Nagari Mandiri; Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah; Indeks Pembangunan Keluarga. Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Administrasi Pemerintahan Desa; Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat; Pengendalian Penduduk; Pembinaan Keluarga Berencana (KB) serta Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	

Painan, 13 Maret 2025

**KEPALA DINAS PMDPPKB**  
**KAB. PESISIR SELATAN**



SALMAN ALFARISI BRUTU, S.STP., M.Si.  
NIP. 19780215 199802 1 001

**PENETAPAN KONTEKS RESIKO OPERASIONAL**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nama Pemda Tahun Penilaian Periode yang dinilai Urusan Pemerintahan OPD yang Dinilai	Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan 2025 Periode RPJMD Tahun 2025-2029 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	
Sumber Data	Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025	
Tujuan Strategis	Tujuan 1.1. Terwujudnya Birokrasi yang Efisien, Adil dan Berkinerja Tinggi Tujuan 2.1. Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Unggul Tujuan 4.1. Terwujudnya Ketahanan Sosial dan Budaya Tujuan 5.1. Meningkatnya Resiliensi Daerah terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	
Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Renja 2025) dan Kegiatan Utama	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Administrasi Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat, Pengendalian Penduduk, Pembinaan Keluarga Berencana (KB) serta Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	
Keluaran/Hasil Kegiatan	1. Jumlah Nagari yang difasilitasi RPJM nya	182 Nagari
	2. Jumlah Fasilitasi Penyusuna RKP Nagari	182 Nagari
	3. Jumlah Nagari yang difasilitasi penyusunan APB Nagari nya	182 Nagari
	4. Jumlah Regulasi Keuangan Nagari yang disosialisasikan	1 Dokumen
	5. Jumlah Pemilihan Lembaga Pemerintahan Nagari	182 Nagari
	6. Jumlah Pelatihan Anggota BUMNag	15 Orang
	7. Jumlah Perguruan Tinggi yang mengadakan KKN	5 Perguruan Tinggi
	8. Jumlah Rapat Koordinasi BUMNag	2 Kali
	9. Jumlah Nagari yang difasilitasi Penyusunan IDM	182 Nagari
	10. Jumlah Nagari yang difasilitasi Penyusunan Profil dan SDGs	182 Nagari
	11. Jumlah Penyelesaian Masalah Nagari	182 Nagari
	12. Jumlah Evaluasi Perkembangan Desa	182 Nagari
	13. Jumlah Lomba Desa dilaksanakan	2 Kali
	14. Advokasi Program Bangga Kencana	1 Dokumen
	15. Jumlah Media Edukasi yang disediakan	5 Jenis
	16. Pelaksanaan Mekanisme Operasional	1 Dokumen
	17. Jumlah Dokumen Operasional dan Sarana untuk Balai Penyuluh	1 Dokumen
	18. Pembinaan BKB, BKR, BKL, UPPKS dan IMP	15 Kecamatan
	19. Jumlah IMP KB yang dibina	182 Nagari
	20. Jumlah Pendistribusian Alat dan Obat ke Fasilitas Kesehatan	1 Dokumen
	21. Jumlah Layanan MKJP	3 Akseptor MOP
		250 Akseptor IUD
3.000 Akseptor Implan		
22. Jumlah Pembinaan Kampung KB	15 Kampung KB	
Program, Kegiatan, dan Indikator Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian resiko	Program : - Administrasi Pemerintahan Desa; - Pembinaan Keluarga Berencana (KB); Kegiatan : - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa; - Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal; - Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB); - Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota; - Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	

Painan, 13 Maret 2025

KEPALA DINAS PMDPPKB  
KAB. PESISIR SELATAN



SALMAN ALFARISI BRUTU, S.STP., M.Si.  
NIP. 19780215 199802 1 001

**Kertas Kerja**  
**Identifikasi Resiko Strategis Pemerintah Daerah**

Nama Pemda		: Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan								
Nama OPD		: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan								
Tahun Penilaian		: 2025								
Periode yang dinilai		: Tahun 2025-2029								
Urusan Pemerintahan		: Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
No	Tujuan/Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	Tujuan 1.1. Terwujudnya Birokrasi yang Efisien, Adil dan Berkinerja Tinggi									
	Sasaran 1.1.2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Berdaya Saing	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Objek Pemeriksaan kurang kooperatif dalam pemberian data yang dibutuhkan saat pelaksanaan pemeriksaan	RSP.23.13.16.01	Kepala Daerah	Tidak jelasnya penanggungjawab penyedia data pada objek pemeriksaan yang bersangkutan	Eksternal	UC	Hasil pemeriksaan tidak efektif dan penyelesaian LHP lambat	Kepala Daerah Perangkat Daerah Terkait
			Peraturan Bupati pengelolaan resiko belum lengkap	RSP.23.13.16.02	Kepala Daerah	Masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki	Internal	C	Pengelolaan resiko belum efektif	Kepala Daerah Perangkat Daerah Terkait
			Kurangnya Komitmen Kepala Perangkat Daerah dalam pencapaian Level Maturitas SPIP Level 3	RSP.23.13.16.03	Kepala Daerah	Masih rendahnya Komitmen Kepala Perangkat Daerah terhadap komitmen bersama tentang pencapaian SPIP Level 3 yang telah disepakati	Eksternal	UC	Tidak tercapainya Maturitas SPIP Level 3	Kepala Daerah Perangkat Daerah Terkait
			Masih adanya pemeriksa yang belum memiliki diklat penjenjangan, mengakibatkan kurang kompetensi dalam melakukan pengawasan	RSP.23.13.16.04	Kepala Daerah	Belum adanya anggaran yang memadai untuk kebutuhan Diklat	Internal	C	Kurang memenuhi syarat jabatan fungsional	Kepala Daerah Perangkat Daerah Terkait
			Terbatasnya SDM Pengelola Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	RSP.23.13.16.05	Kepala Daerah	Masih ada SDM yang belum mengikuti Diklat tentang penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Internal	C	Masih terdapat kekurangan Kualitas Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Kepala Daerah Perangkat Daerah Terkait

No	Tujuan/Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
			Kurangnya Komitmen antara Perangkat Daerah maupun Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam mempersiapkan bahan/data sesuai jadwal perencanaan yang telah ditetapkan, mengakibatkan terlambatnya pelaksanaan evaluasi RKPD maupun RKA	RSP.23.13.16.06	Kepala Daerah	Kurangnya Komitmen antara Perangkat Daerah maupun Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam menyikapi kesepakatan yang telah ditetapkan bersama	Eksternal	UC	Laporan dan rekomendasi revidi yang dilaksanakan menjadi kurang sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan	Kepala Daerah Perangkat Daerah Terkait
			Kurangnya harmonisasi antara Tim Review dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam penyusunan dokumen RKPD maupun RKA, mengakibatkan keterlambatan pembahasan RAPBD	RSP.23.13.16.07	Kepala Daerah	Terjadi perbedaan persepsi dalam beban dan tanggungjawab penyusunan RKPD dan RKA	Eksternal	UC	Laporan dan rekomendasi review yang dilaksanakan menjadi tidak tepat waktu	Kepala Daerah Perangkat Daerah Terkait
			Kemungkinan tidak ditindaklanjuti hasil evaluasi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah, mengakibatkan dokumen RKPD maupun RKA kurang berkualitas	RSP.23.13.16.08	Kepala Daerah	Kurangnya Komitmen Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk menindaklanjuti hasil review yang telah direkomendasikan Tim Evaluasi APIP	Eksternal	UC	Hasil Dokumen RKPD dan RKA menjadi kurang berkualitas	Kepala Daerah Perangkat Daerah Terkait

**Keterangan:**

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPJMD/Renstra

Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis

Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom e diisi dengan Kode risiko

Kolom f diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : Man, Money, Method, Machine, dan Material


Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko

Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum

Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

Painan, 13 Maret 2025  
**KEPALA DINAS PMDPPKB  
 KAB. PESISIR SELATAN**



**SALMAN ALFARISI BRUTU, S.STP., M.Si.**  
 NIP. 19780215 199802 1 001

**Kertas Kerja**  
**Identifikasi Risiko Strategis OPD**

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan  
 Nama OPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan  
 Tahun Penilaian : 2025  
 Periode yang dinilai : Tahun 2025-2029  
 Tujuan Strategis : Terwujudnya Birokrasi yang Efisien, Adil dan Berkinerja Tinggi, Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Terwujudnya Ketahanan Sosial dan Budaya, Meningkatkan Resiliensi Daerah terhadap Bencana dan Perubahan Iklim  
 Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Tujuan/Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	Tujuan :									
	Meningkatkan Kualitas Pemerintahan Nagari dan Lembaga Kemasyarakatan serta Keluarga Berkualitas									
	Sasaran :									
	1. Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	1. Nilai AKIP Perangkat Daerah	1. Rendahnya Pemahaman Aparatur tentang Maksud dan Tujuan Reformasi Birokrasi	RSO.23.13.16.01	Kepala OPD	Kurangnya sosialisasi dan minat membaca regulasi terkait	Internal	C	Tidak tercapainya Nilai RB DPMDPPKB	DPMDPPKB
			2. Roadmap Reformasi Birokrasi disusun tidak secara optimal dan mengacu pada isu strategis	RSO.23.13.16.02	Kepala OPD	Kurangnya komitmen terhadap capaian RB	Internal	C	Tidak tercapainya Nilai RB DPMDPPKB	DPMDPPKB
			3. Tidak maksimalnya pemenuhan kriteria sub komponen SAKIP	RSO.23.13.16.03	Kepala OPD	Kurangnya pengetahuan tentang SAKIP	Internal	C	Tidak tercapainya Nilai RB DPMDPPKB	DPMDPPKB
			4. Pemahaman tentang pentingnya SAKIP pada Perangkat Daerah hanya dimiliki oleh segelintir aparatur yang bersentuhan langsung dengan pemenuhan kriteria SAKIP	RSO.23.13.16.04	Kepala OPD	Kurangnya sosialisasi dan minat membaca regulasi terkait	Internal	C	Tidak tercapainya Nilai AKIP DPMDPPKB	DPMDPPKB
			5. Rendahnya Komitmen Perangkat Daerah dalam meningkatkan kualitas dokumen perencanaan	RSO.23.13.16.05	Kepala OPD	Kurangnya Sosialisasi dan minat membaca regulasi terkait	Internal	C	Tidak tercapainya target Nilai SAKIP Daerah	DPMDPPKB
			6. Rendahnya Pemahaman Pimpinan Perangkat Daerah tentang esensi dari Pengukuran Kinerja sehingga upaya yang diberikan dalam hal pengukuran kinerja sangat minim	RSO.23.13.16.06	Kepala OPD	Kurangnya pengetahuan tentang pentingnya pengukuran kinerja	Internal	C	Tidak tercapainya target Nilai SAKIP Daerah	DPMDPPKB

No	Tujuan/Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Resiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
			7. Rendahnya kedisiplinan Perangkat Daerah dalam menyampaikan laporan capaian kinerja	RSO.23.13.16.07	Kepala OPD	Rendahnya disiplin penyampaian laporan capaian kinerja	Internal	C	Tidak tercapainya target Nilai SAKIP Daerah	DPMDPPKB
			8. Kurang maksimalnya Staf DPMDPPKB dalam melakukan koordinasi dalam mengawal capaian kinerja dan pelaporannya	RSO.23.13.16.08	Kepala OPD	Terbatasnya Staf DPMDPPKB	Internal	C	Tidak tercapainya target Nilai SAKIP Daerah	DPMDPPKB
		2. Persentase Nagari Mandiri	1. Belum optimalnya Nagari Mandiri untuk meningkatkan Status IDM di Kabupaten Pesisir Selatan	RSO.23.13.16.09	Kepala OPD	Terbatasnya Fasilitas yang memadai untuk Nagari Mandiri	Internal	C	Tidak tercapainya target Nagari Mandiri	DPMDPPKB
			2. Kurangnya maksimalnya Nagari yang memiliki Pendapatan Asli Nagari (PAN)	RSO.23.13.16.10	Kepala OPD	Terdapat 182 Nagari yang memiliki Pendapatan Asli Nagari (PAN) di Kabupaten Pesisir Selatan	Internal	C	Rendahnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nagari	DPMDPPKB
	2. Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	3. Meningkatnya Inovasi Daerah	1. Kurangnya maksimalnya Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Nagari	RSO.23.13.16.11	Kepala OPD	Terdapat 182 Nagari untuk dilakukan Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan	Internal	C	Kepuasan Masyarakat rendah terhadap Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan	DPMDPPKB
			2. Tidak menindaklanjuti rekomendasi, sehingga mengakibatkan belum meningkatnya SPIP	RSO.23.13.16.12	Kepala OPD	Rekomendasi kurang ditindaklanjuti	Eksternal	UC	Adanya Rekomendasi yang belum ditindak lanjuti	DPMDPPKB
			3. SDM belum menguasai mekanisme Tindak Lanjut Rekomendasi yang akan menghambat proses penyelesaian Rekomendasi	RSO.23.13.16.13	Kepala OPD	Ketentuan Tindak Lanjut Rekomendasi belum dipedomani secara optimal	Internal	C	Terdapat tindak lanjut tidak sesuai dengan rekomendasi	DPMDPPKB
	3. Terwujudnya Keluarga Bahagia	4. Indeks Pembangunan Keluarga	1. Kurangnya maksimalnya mewujudkan Dimensi Keluarga Bahagia : Kebahagiaan, Kemandirian dan Ketentraman di Kab. Pesisir Selatan	RSO.23.14.17.01	Kepala OPD	Banyaknya item untuk mencapai Dimensi Keluarga Bahagia : Kebahagiaan, Kemandirian dan Ketentraman	Internal	C	Belum Optimalnya Dimensi Keluarga Bahagia : Kebahagiaan, Kemandirian dan Ketentraman	DPMDPPKB

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPJMD/Renstra

Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis

Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom e diisi dengan Kode risiko

No	Tujuan/Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Resiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k

Kolom f diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : Man, Money, Method, Machine, dan Material


Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko

Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum

Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

Painan, 13 Maret 2025  
 KEPALA DINAS PMDPPKB  
 KAB. PESISIR SELATAN



SALMAN ALFARISI BRUTU, S.STP., M.Si  
 NIP. 19780215 199802 1 001

**Formulir Kertas Kerja  
Identifikasi Resiko Operasional OPD**

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
Nama OPD	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Penilaian	: 2025
Periode yang dinilai	: Tahun 2025-2029
Tujuan Strategis	: Terwujudnya Birokrasi yang Efisien, Adil dan Berkinerja Tinggi, Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Unggul, Terwujudnya Ketahanan Sosial dan Budaya, Meningkatnya Resiliensi Daerah terhadap Bencana dan Perubahan Iklim
Sasaran Strategis OPD	: 1. Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja 2. Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah 3. Terwujudnya Keluarga Bahagia
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Resiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Resiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
	Program : Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Aparatur Nagari yang dibayarkan BPJSnya	Perencanaan	Data BPJS Kesehatan Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang belum memiliki jaminan kesehatan	ROO.23.13.16.01	Kepala OPD	Kurangnya Koordinasi dengan Pemerintahan Nagari	Internal	C	Perencanaan yang kurang tepat	Kepala Daerah dan OPD Terkait
				Perhitungan kebutuhan dana tidak tepat	ROO.23.13.16.02	Kepala OPD	Tidak akuratnya data BPJS Kesehatan untuk Pemerintahan Nagari	Internal	C	Terhambatnya Pelayanan	Kepala Daerah dan OPD Terkait
	Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		Pelaksanaan	Proses cross check data dengan BPJS Kesehatan yang membutuhkan waktu lama	ROO.23.13.16.03	Kepala OPD	Kurangnya Koordinasi dengan Pemerintahan Nagari	Internal	C	Terhambatnya Pelayanan	Kepala Daerah dan OPD Terkait

**Keterangan**  
Kolom a diisi dengan nomor urut  
Kolom b diisi dengan kegiatan, tujuan kegiatan, dan sasaran kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKA SKPD  
Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan/sasaran kegiatan  
Kolom d diisi dengan tahapan kegiatan  
Kolom e diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko  
Kolom f diisi dengan Kode risiko  
Kolom g diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko  
Kolom h diisi dengan penyebab timbulnya risiko, Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : Man, Money, Method, Machine, dan Material  
Kolom i diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)  
Kolom j diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan penyebab risiko  
Kolom k diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum  
Kolom l diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

Painan, 13 Maret 2025

KEPALA DINAS PMDPPKB  
KAB. PESISIR SELATAN

  
**SALMAN ALFARISI BRUTU, S.STP., M.Si.**  
NIP. 19780215 199802 1 001

**Formulir Kertas Kerja  
Hasil Analisis Resiko**

Nama Pemda	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan				
Tahun Penilaian	: 2025				
Tujuan Strategis	: Terwujudnya Birokrasi yang Efisien, Adil dan Berkinerja Tinggi, Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Unggul, Terwujudnya Ketahanan Sosial dan Budaya, Meningkatnya Resiliensi Daerah terhadap Bencana dan Perubahan Iklim				
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
No.	"Resiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak *)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f = d x e
	<b>I Risiko Strategis : Pemerintah Daerah</b>				
1	Objek Pemeriksaan kurang kooperatif dalam pemberian data yang dibutuhkan saat pelaksanaan pemeriksaan	RSP.23.13.16.01	2	2	4
2	Peraturan Bupati pengelolaan resiko belum lengkap	RSP.23.13.16.02	2	3	6
3	Kurangnya Komitmen Kepala Perangkat Daerah dalam pencapaian Level Maturitas SPIP Level 3	RSP.23.13.16.03	3	2	6
4	Masih adanya pemeriksa yang belum memiliki diklat penjenjangan, mengakibatkan kurang kompetensi dalam melakukan pengawasan	RSP.23.13.16.04	2	2	4
5	Terbatasnya SDM Pengelola Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	RSP.23.13.16.05	4	4	16
6	Kurangnya Komitmen antara Perangkat Daerah maupun Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam mempersiapkan bahan/data sesuai jadwal perencanaan yang telah ditetapkan, mengakibatkan terlambatnya pelaksanaan evaluasi RKPD maupun RKA	RSP.23.13.16.06	4	4	16
7	Kurangnya harmonisasi antara Tim Review dengan Tim Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam penyusunan dokumen RKPD maupun RKA, mengakibatkan keterlambatan pembahasan RAPBD	RSP.23.13.16.07	4	4	16
8	Kemungkinan tidak ditindaklanjuti hasil evaluasi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah, mengakibatkan dokumen RKPD maupun RKA kurang berkualitas	RSP.23.13.16.08	4	4	16
	<b>II Risiko Strategis OPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan</b>				
9	Rendahnya Pemahaman Aparatur tentang Maksud dan Tujuan Reformasi Birokrasi	RSO.23.13.16.01	2	2	4
10	Roadmap Reformasi Birokrasi disusun tidak secara optimal dan mengacu pada isu strategis	RSO.23.13.16.02	2	2	4
11	Tidak maksimalnya pemenuhan kriteria sub komponen SAKIP	RSO.23.13.16.03	3	3	9
12	Pemahaman tentang pentingnya SAKIP pada Perangkat Daerah hanya dimiliki oleh segelintir aparaturnya yang bersentuhan langsung dengan pemenuhan kriteria SAKIP	RSO.23.13.16.04	3	3	9
13	Rendahnya Komitmen Perangkat Daerah dalam meningkatkan kualitas dokumen perencanaan	RSO.23.13.16.05	4	4	16
14	Rendahnya Pemahaman Pimpinan Perangkat Daerah tentang esensi dari Pengukuran Kinerja sehingga upaya yang diberikan dalam hal pengukuran kinerja sangat minim	RSO.23.13.16.06	4	4	16
15	Rendahnya kedisiplinan Perangkat Daerah dalam menyampaikan laporan capaian kinerja	RSO.23.13.16.07	2	2	4
16	Kurang maksimalnya Staf DPMDPPKB dalam melakukan koordinasi dalam mengawal capaian kinerja dan pelaporannya	RSO.23.13.16.08	4	4	16
17	Belum optimalnya Nagari Mandiri untuk meningkatkan Status IDM di Kabupaten Pesisir Selatan	RSO.23.13.16.09	4	4	16
18	Kurangnya maksimalnya Nagari yang memiliki Pendapatan Asli Nagari (PAN)	RSO.23.13.16.10	4	3	12
19	Kurangnya maksimalnya Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Nagari	RSO.23.13.16.11	4	3	12
20	Tidak menindaklanjuti rekomendasi, sehingga mengakibatkan belum meningkatnya SPIP	RSO.23.13.16.12	4	4	16
21	SDM belum menguasai mekanisme Tindak Lanjut Rekomendasi yang akan menghambat proses penyelesaian Rekomendasi	RSO.23.13.16.13	4	4	16
22	Kurangnya maksimalnya mewujudkan Dimensi Keluarga Bahagia : Kebahagiaan, Kemandirian dan Ketentraman di Kab. Pesisir Selatan	RSO.23.14.17.01	4	3	12

No.	"Resiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak *)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f = d x e
III	Risiko Operasional OPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan				
23	Data BPJS Kesehatan Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang belum memiliki jaminan kesehatan	ROO.23.13.16.01	4	3	12
24	Perhitungan kebutuhan dana tidak tepat	ROO.23.13.16.02	2	2	4
25	Proses cross check data dengan BPJS Kesehatan yang membutuhkan waktu lama	ROO.23.13.16.03	3	2	6

**Keterangan:**

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi sesuai lampiran 6a dan 6b

Kolom c diisi dengan kode risiko sesuai lampiran 6a dan 6b

Kolom d diisi dengan skala dampak berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala dampak yang diberikan peserta diskusi

Kolom e diisi dengan skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala kemungkinan yang diberikan peserta diskusi

Kolom f diisi dengan hasil perkalian antara skala dampak dan skala kemungkinan

Painan, 13 Maret 2025

KEPALA DINAS PMDPPKB  
KAB. PESISIR SELATAN



SALMAN ALFARISI BRUTU, S.STP., M.Si.  
NIP. 19780215 199802 1 001

## Matriks Analisis Resiko

Matriks Analisis Resiko			Dampak/Konsekuensi			
			Tidak signifikan	Kurang Signifikan	Signifikan	Sangat signifikan
			1	2	3	4
Kemungkinan terjadinya Resiko	Hampir pasti	4				5, 6, 7, 8, 13, 14, 16, 17, 20, 21
	Kemungkinan besar	3		2	11, 12	18, 19, 22, 23
	Kemungkinan kecil	2		1, 4, 9, 10, 15, 24	3, 25	
	Sangat jarang	1				

Keterangan :	Sangat Rendah	Resiko dapat diterima
	Rendah	Resiko dapat diterima
	Tinggi	Resiko Tidak dapat Diterima/Penanganan Selanjutnya
	Sangat Tinggi	Resiko Tidak dapat Diterima/Penanganan Prioritas

No	Kemungkinan	Konsekuensi/Dampak				
		Tidak Signifikan	Kurang Signifikan	Sedang	Signifikan	Katastropik/Sangat Signifikan
1	Sangat	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
2	Sering	Sedang	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
3	Kadang-kadang	Rendah	Sedang	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi
4	Jarang	Rendah	Rendah	Sedang	Sedang	Tinggi
5	Sangat Jarang	Rendah	Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi

Painan, 13 Maret 2025

KEPALA DINAS PMDPPKB  
KAB. PESISIR SELATAN



SALMAN ALFARISI BRUTU, S.STP., M.Si.  
NIP. 19780215 199802 1 001

**Formulir Kertas Kerja  
Daftar Resiko Prioritas**

Nama Pemda	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Penilaian	: 2025
Tujuan Strategis	: Terwujudnya Birokrasi yang Efisien, Adil dan Berkinerja Tinggi, Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Unggul, Terwujudnya Ketahanan Sosial dan Budaya, Meningkatnya Resiliensi Daerah terhadap Bencana dan Perubahan Iklim
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No.	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
<b>I</b>	<b>Risiko Strategis Pemerintah Daerah</b>					
1	Peraturan Bupati pengelolaan resiko belum lengkap	RSP.23.13.16.02	6	Kepala Daerah	Masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki	Pengelolaan resiko belum efektif
2	Kurangnya Komitmen Kepala Perangkat Daerah dalam pencapaian Level Maturitas SPIP Level 3	RSP.23.13.16.03	6	Kepala Daerah	Masih rendahnya Komitmen Kepala Perangkat Daerah terhadap komitmen bersama tentang pencapaian SPIP Level 3 yang telah disepakati	Tidak tercapainya Maturitas SPIP Level 3
3	Terbatasnya SDM Pengelola Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	RSP.23.13.16.05	16	Kepala Daerah	Masih ada SDM yang belum mengikuti Diklat tentang penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Masih terdapat kekurangan Kualitas Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah
4	Kurangnya Komitmen antara Perangkat Daerah maupun Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam mempersiapkan bahan/data sesuai jadwal perencanaan yang telah ditetapkan, mengakibatkan terlambatnya pelaksanaan evaluasi RKPD maupun RKA	RSP.23.13.16.06	16	Kepala Daerah	Kurangnya Komitmen antara Perangkat Daerah maupun Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam menyikapi kesepakatan yang telah ditetapkan bersama	Laporan dan rekomendasi reuiu yang dilaksanakan menjadi kurang sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan
5	Kurangnya harmonisasi antara Tim Review dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam penyusunan dokumen RKPD maupun RKA, mengakibatkan keterlambatan pembahasan RAPBD	RSP.23.13.16.07	16	Kepala Daerah	Terjadi perbedaan persepsi dalam beban dan tanggungjawab penyusunan RKPD dan RKA	Laporan dan rekomendasi review yang dilaksanakan menjadi tidak tepat waktu
6	Kemungkinan tidak ditindaklanjuti hasil evaluasi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah, mengakibatkan dokumen RKPD maupun RKA kurang berkualitas	RSP.23.13.16.08	16	Kepala Daerah	Kurangnya Komitmen Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk menindaklanjuti hasil review yang telah direkomendasikan Tim Evaluasi APIP	Hasil Dokumen RKPD dan RKA menjadi kurang berkualitas
<b>II</b>	<b>Risiko Strategis OPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan</b>					
7	Tidak maksimalnya pemenuhan kriteria sub komponen SAKIP	RSO.23.13.16.03	9	Kepala OPD	Kurangnya pengetahuan tentang SAKIP	Tidak tercapainya Nilai RB DPMDPPKB
8	Pemahaman tentang pentingnya SAKIP pada Perangkat Daerah hanya dimiliki oleh segelintir aparatur yang bersentuhan langsung dengan pemenuhan kriteria SAKIP	RSO.23.13.16.04	9	Kepala OPD	Kurangnya sosialisasi dan minat membaca regulasi terkait	Tidak tercapainya Nilai AKIP DPMDPPKB

No.	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
9	Rendahnya Komitmen Perangkat Daerah dalam meningkatkan kualitas dokumen perencanaan	RSO.23.13.16.05	16	Kepala OPD	Kurangnya Sosialisasi dan minat membaca regulasi terkait	Tidak tercapainya target Nilai SAKIP Daerah
10	Rendahnya Pemahaman Pimpinan Perangkat Daerah tentang esensi dari Pengukuran Kinerja sehingga upaya yang diberikan dalam hal pengukuran kinerja sangat minim	RSO.23.13.16.06	16	Kepala OPD	Kurangnya pengetahuan tentang pentingnya pengukuran kinerja	Tidak tercapainya target Nilai SAKIP Daerah
11	Kurang maksimalnya Staf DPMDPPKB dalam melakukan koordinasi dalam mengawal capaian kinerja dan pelaporannya	RSO.23.13.16.08	16	Kepala OPD	Terbatasnya Staf DPMDPPKB	Tidak tercapainya target Nilai SAKIP Daerah
12	Belum optimalnya Nagari Mandiri untuk meningkatkan Status IDM di Kabupaten Pesisir Selatan	RSO.23.13.16.09	16	Kepala OPD	Terbatasnya Fasilitas yang memadai untuk Nagari Mandiri	Tidak tercapainya target Nagari Mandiri
13	Kurangnya maksimalnya Nagari yang memiliki Pendapatan Asli Nagari (PAN)	RSO.23.13.16.10	12	Kepala OPD	Terdapat 182 Nagari yang memiliki Pendapatan Asli Nagari (PAN) di Kabupaten Pesisir Selatan	Rendahnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nagari
14	Kurangnya maksimalnya Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Nagari	RSO.23.13.16.11	12	Kepala OPD	Terdapat 182 Nagari untuk dilakukan Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan	Kepuasan Masyarakat rendah terhadap Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan
15	Tidak menindaklanjuti rekomendasi, sehingga mengakibatkan belum meningkatnya SPIP	RSO.23.13.16.12	16	Kepala OPD	Rekomendasi kurang ditindaklanjuti	Adanya Rekomendasi yang belum ditindak lanjuti
16	SDM belum menguasai mekanisme Tindak Lanjut Rekomendasi yang akan menghambat proses penyelesaian Rekomendasi	RSO.23.13.16.13	16	Kepala OPD	Ketentuan Tindak Lanjut Rekomendasi belum dipedomani secara optimal	Terdapat tindak lanjut tidak sesuai dengan rekomendasi
17	Kurangnya maksimalnya mewujudkan Dimensi Keluarga Bahagia : Kebahagiaan, Kemandirian dan Ketentraman di Kab. Pesisir Selatan	RSO.23.14.17.01	12	Kepala OPD	Banyaknya item untuk mencapai Dimensi Keluarga Bahagia : Kebahagiaan, Kemandirian dan Ketentraman	Belum Optimalnya Dimensi Keluarga Bahagia : Kebahagiaan, Kemandirian dan Ketentraman
<b>III Risiko Operasional OPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan</b>						
18	Data BPJS Kesehatan Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang belum memiliki jaminan kesehatan	ROO.23.13.16.01	12	Kepala OPD	Kurangnya Koordinasi dengan Pemerintahan Nagari	Perencanaan yang kurang tepat
19	Proses cross check data dengan BPJS Kesehatan yang membutuhkan waktu lama	ROO.23.13.16.03	6	Kepala OPD	Kurangnya Koordinasi dengan Pemerintahan Nagari	Terhambatnya Pelayanan

**Keterangan**

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko prioritas

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan skala risiko (sesuai lampiran 7)

Kolom e diisi dengan pemilik risiko sesuai Lampiran 6a dan 6b

Kolom f diisi dengan penyebab sesuai Lampiran 6a dan 6b

Kolom g diisi dengan dampak sesuai dengan Lampiran 6a dan 6b

Painan, 13 Maret 2025

**KEPALA DINAS PMDPPKB  
KAB. PESISIR SELATAN**



**SALMAN ALFARISI BRUTU, S.STP., M.Si.**  
NIP. 19780215 199802 1 001

**Formulir Kertas Kerja**  
**Penilaian Atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan**

Nama Pemerintah Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan  
 Tahun Penilaian : 2025

No.	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e
<b>I Komitmen Terhadap Kompetensi</b>				
1	Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan	Meskipun belum sesuai kompetensi dan pengalaman, pegawai diberikan pengetahuan sambil melaksanakan kegiatan dan di asistensi oleh pejabat yang berpengalaman dalam bidang bersangkutan	Kepala Dinas	Triwulan II 2025
2	Pemda telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai	Membuat PETA kompetensi pegawai dan SOP penempatan Pegawai	BKPSDM	Triwulan II 2025
3	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala	Membuat telaahan staf terkait pelatihan pengelolaan risiko kepada pimpinan	Sekretaris	Triwulan II 2025
<b>II Kepemimpinan Yang Kondusif</b>				
1	Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko	Secara lisan Pimpinan telah memberikan arahan terkait pengelolaan risiko	Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang	Triwulan I 2025
2	Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan	Pimpinan memberikan arahan secara rutin dalam apel namun belum secara terformat dan berdasarkan dokumen SOP	Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang	Setiap Bulan
3	Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses pengelolaan risiko	Penyusunan kebijakan pengelolaan risiko dan pengendaliannya dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan	Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang	Per Triwulan
<b>III Pembentukan Struktur Organisasi Yang Sesuai Dengan Kebutuhan</b>				
1	Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	Masing-masing pihak belum sepenuhnya memahami peran dan tanggungjawab dalam pengelolaan risiko	Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang	Triwulan I 2025
2	Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	Belum adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang	Per Triwulan
<b>IV Penyusunan dan Penerapan Kebijakan Yang Sehat Tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia</b>				
1	Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja	Insentif pegawai sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja	BKPAD	Setiap Bulan
2	Pemda telah menginternalisasi budaya sadar risiko	Diterapkannya budaya sadar risiko	Inspektorat	Per Triwulan
3	Adanya pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)	Pemberian reward atas pengelolaan risiko	DPMDPPKB	Per Triwulan
4	Instansi telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM	Instansi mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM	BKPSDM	Per Triwulan

Keterangan :

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan kondisi lingkungan pengendalian yang kurang memadai

Kolom c diisi dengan perbaikan yang akan dilakukan

Kolom d diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian

Kolom e diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

Painan, 13 Maret 2025

KEPALA DINAS PMDPPKB  
KAB. PESISIR SELATAN



SALMAN ALFARISI BRUTU, S.STP., M.Si.  
NIP. 19780215 199802 1 001



No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
II	<b>Risiko Strategis OPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan</b>						
7	Tidak maksimalnya pemenuhan kriteria sub komponen SAKIP	RSO.23.13.16.03	Kriteria Sub Komponen SAKIP	Prosedur pemenuhan kriteria sub komponen SAKIP	Meningkatkan Pengetahuan tentang SAKIP	Kepala OPD	Triwulan II 2025
8	Pemahaman tentang pentingnya SAKIP pada Perangkat Daerah hanya dimiliki oleh segelintir aparatur yang bersentuhan langsung dengan pemenuhan kriteria SAKIP	RSO.23.13.16.04	SAKIP pada Perangkat Daerah dan Kriteria SAKIP	Kualitas SAKIP pada Perangkat Daerah dengan pemenuhan Kriteria SAKIP	Memberikan Sosialisasi dan Minat Membaca Regulasi Terkait	Kepala OPD	Triwulan II 2025
9	Rendahnya Komitmen Perangkat Daerah dalam meningkatkan kualitas dokumen perencanaan	RSO.23.13.16.05	Komitmen Perangkat Daerah	Kualitas Dokumen Perencanaan yang belum sesuai panduan	Memberikan Sosialisasi dan Minat Membaca Regulasi Terkait	Kepala OPD	Triwulan I 2025
10	Rendahnya Pemahaman Pimpinan Perangkat Daerah tentang esensi dari Pengukuran Kinerja sehingga upaya yang diberikan dalam hal pengukuran kinerja sangat minim	RSO.23.13.16.06	Pengukuran Kinerja	Kualitas dan Kuantitas Pengukuran Kinerja yang diberikan masih minim belum sesuai target dan capaian kinerja	Meningkatkan Pengetahuan tentang Pentingnya Pengukuran Kinerja	Kepala OPD	Triwulan I 2025
11	Kurang maksimalnya Staf DPMDPPKB dalam melakukan koordinasi dalam mengawal capaian kinerja dan pelaporannya	RSO.23.13.16.08	Capaian Kinerja dan Pelaporan	Kualitas dan Kuantitas SDM Staf DPMDPPKB yang terlatih kurang	Mengadakan Pelatihan SDM untuk mencapai target Nilai SAKIP OPD	Kepala OPD	Triwulan IV 2025
12	Belum optimalnya Nagari Mandiri untuk meningkatkan Status IDM di Kabupaten Pesisir Selatan	RSO.23.13.16.09	Nagari Mandiri di Kabupaten Pesisir Selatan	Prosedur pengendalian tidak dapat dilaksanakan	Meningkatkan Status IDM di Kabupaten Pesisir Selatan menjadi Nagari Mandiri	Kepala OPD	Triwulan IV 2025
13	Kurangnya maksimalnya Nagari yang memiliki Pendapatan Asli Nagari (PAN)	RSO.23.13.16.10	Nagari yang memiliki Pendapatan Asli Nagari (PAN)	Kualitas dan Kuantitas terdapat 182 Nagari yang memiliki Pendapatan Asli Nagari (PAN) di Kabupaten Pesisir Selatan	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nagari	Kepala OPD	Triwulan IV 2025
14	Kurangnya maksimalnya Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Nagari	RSO.23.13.16.11	Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Nagari	Kualitas dan Kuantitas terdapat 182 Nagari untuk dilakukan Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan	Kepala OPD	Triwulan IV 2025
15	Tidak menindaklanjuti rekomendasi, sehingga mengakibatkan belum meningkatnya SPIP	RSO.23.13.16.12	Teguran lisan/pemanggilan Perangkat Daerah bersangkutan	Prosedur pengendalian belum dilaksanakan	Pemberian Sanksi yang lebih tegas pada objek pemeriksaan yang bersangkutan dan Komitmen dari Kepala Daerah	Objek Pemeriksaan yang bersangkutan	Triwulan II 2025

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
16	SDM belum menguasai mekanisme Tindak Lanjut Rekomendasi yang akan menghambat proses penyelesaian Rekomendasi	RSO.23.13.16.13	Bimbingan secara non formal	Kualitas SDM untuk pengendalian resiko yang ada belum optimal dalam mengatasi resiko yang ada	Menyusun sistem dan prosedur Tindak Lanjut Rekomendasi, Sosialisasi SOP pada Tim dan Evaluasi Tindak Lanjut Rekomendasi terhadap masing-masing tim monitoring	Sekretaris	Triwulan II 2025
17	Kurangnya maksimalnya mewujudkan Dimensi Keluarga Bahagia : Kebahagiaan, Kemandirian dan Ketentraman di Kab. Pesisir Selatan	RSO.23.14.17.01	Dimensi Keluarga Bahagia : Kebahagiaan, Kemandirian dan Ketentraman	Prosedur Mewujudkan Dimensi Keluarga Bahagia : Kebahagiaan, Kemandirian dan Ketentraman	Mengoptimalkan Dimensi Keluarga Bahagia : Kebahagiaan, Kemandirian dan Ketentraman	Kepala OPD	Triwulan IV 2025
<b>III Risiko Operasional OPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan</b>							
18	Data BPJS Kesehatan Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang belum memiliki jaminan kesehatan	ROO.23.13.16.01	Koordinasi dengan Pemerintahan Nagari	Prosedur pengendalian belum dilaksanakan	Evaluasi atas implementasi BPJS Kesehatan	Kepala OPD	Triwulan I 2025
19	Proses cross check data dengan BPJS Kesehatan yang membutuhkan waktu lama	ROO.23.13.16.03	Koordinasi dengan Pemerintahan Nagari	Prosedur pengendalian belum dilaksanakan	Evaluasi atas implementasi BPJS Kesehatan	Kepala OPD	Triwulan I 2025

**Keterangan**

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko prioritas

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan uraian pengendalian-pengendalian yang sudah ada/ terpasang. Agar diungkap tidak hanya nama SOP nya, Contoh SOP Pemeliharaan: Gedung dibersihkan 2 kali sehari.

Kolom e diisi dengan alasan tidak efektif :

- (1) Kebijakan dan Prosedur Pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,
- (2) Prosedur Pengendalian Belum/Tidak dapat dilaksanakan,
- (3) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas,
- (4) Kebijakan dan Prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya

Kolom f diisi dengan pengendalian yang masih dibutuhkan

Kolom g diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian

Kolom h diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

Painan, 13 Maret 2025

**KEPALA DINAS PMDPPKB  
KAB. PESISIR SELATAN**



**SALMAN ALFARISI BRUTU, S.STP., M.Si.**  
NIP. 19780215 199802 1 001

**PENGGOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN**

Nama Pemda	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan						
Tahun Penilaian	: 2025						
Tujuan Strategis	: Terwujudnya Birokrasi yang Efisien, Adil dan Berkinerja Tinggi, Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Unggul, Terwujudnya Ketahanan Sosial dan Budaya, Meningkatnya Resiliensi Daerah terhadap Bencana dan Perubahan Iklim						
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
No.	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Revisi Peraturan Bupati tentang pengelolaan risiko	Revisi Peraturan Bupati	Inspektorat, Bagian Hukum Sekda	Perangkat Daerah	Triwulan I 2025	Triwulan I 2025	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti Dokumentasi berupa Notulen
2	Evaluasi implementasi komitmen bersama Kepala Perangkat Daerah dalam pencapaian Level 3 Maturitas SPIP	Surat undangan, pernyataan komitmen, RTP	Inspektorat	Perangkat Daerah	Per Bulan	Per Bulan	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti Dokumentasi berupa Notulen
3	Mengadakan FGD dan Sosialisasi Hasil Pelatihan LAKIP	FGD, Sosialisasi, Surat undangan, Notulen rapat	Sekda, Bapedalitbang	Perangkat Daerah	Triwulan I 2025	Triwulan II 2025	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti Dokumentasi berupa Notulen
4	Melakukan Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan evaluasi LAKIP	Surat Undangan, Rapat Koordinasi, Bahan Evaluasi, Laptop, Printer, dll	Sekda, Bapedalitbang	Perangkat Daerah	Triwulan I 2025	Triwulan II 2025	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti Dokumentasi berupa Notulen
5	Memberikan teguran dari Sekretaris Daerah terhadap Perangkat Daerah/Tim Anggaran Pemerintah Daerah	Surat Teguran	Sekda	Perangkat Daerah dan TAPD	Triwulan III 2025	Triwulan III 2025	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti Dokumentasi berupa Notulen
6	Komitmen Kepala Perangkat Daerah dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah	Surat Pemberitahuan, Surat Pernyataan Komitmen	Irban II	Seluruh Perangkat Daerah dan TAPD	Per Triwulan	Per Triwulan	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti Dokumentasi berupa Notulen
7	Komitmen Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Inspektorat	Surat Pernyataan Komitmen, SOP	Irban II	TAPD dan Inspektorat	Per Triwulan	Per Triwulan	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti Dokumentasi berupa Notulen

No.	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
8	Ekspost pada Rapat Koordinasi hasil pengawasan Pemerintah Daerah	Surat Undangan, Bahan Expost, Laptop, Proyektor, dll	BPK, Inspektorat Provinsi, BPKP dan Inspektorat Kabupaten	Seluruh Perangkat Daerah terkait temuan	Triwulan I 2025	Triwulan II 2025	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti Dokumentasi berupa Notulen
9	Komitmen Tim Anggaran Pemerintah Daerah	Surat Tindak Lanjut	Irbn II	TAPD	2 Kali Per Tahun	2 Kali Per Tahun	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti Dokumentasi berupa Notulen
10	Komitmen seluruh APIP untuk peningkatan kapabilitas	Rapat Internal APIP	Inspektorat	Seluruh APIP	Per Tahun	Per Tahun	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti Dokumentasi berupa Notulen
11	Menyiapkan bahan/dokumentasi terkait peningkatan kapabilitas APIP	Rapat Internal APIP	Inspektorat	Seluruh APIP	Per Tahun	Per Tahun	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti Dokumentasi berupa Notulen
12	Pemberian Sanksi yang lebih tegas pada obrik yang bersangkutan	SOP Pemeriksaan, Surat Teguran	Inspektorat	Objek Pemeriksaan terkait	Per Bulan	Per Bulan	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti Dokumentasi berupa Notulen
13	Menyusun sistem dan prosedur Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Aturan / Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Sekretaris	Inspektorat	Triwulan I 2025	Triwulan II 2025	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti Dokumentasi berupa Notulen
14	Sosialisasi SOP pada Tim Anggaran Pemerintah Daerah	SOP Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Sekretaris	Inspektorat	Per Bulan	Per Bulan	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti Dokumentasi berupa Notulen
15	Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan terhadap masing-masing Tim Monitoring	Surat Undangan, Bahan Evaluasi, Laptop, Printer, dll	Sekretaris	Inspektorat	Per Bulan	Per Bulan	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti Dokumentasi berupa Notulen
16	Evaluasi berjenjang terhadap pelaksanaan review	Rapat Bulanan	Kasubag Administrasi Umum dan Keuangan	Irbn dan Seluruh Pejabat Fungsional	Per Bulan	Per Bulan	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti Dokumentasi berupa Notulen

No.	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
17	Melakukan Verifikasi LHP oleh Atasan masing-masing	LHP, Peraturan-Peraturan terkait tentang Pemeriksaan pada Perangkat Daerah	Irbn II	Inspektorat	Per Bulan	Per Bulan	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti Dokumentasi berupa Notulen
18	Memperbaiki Kualitas LHP sesuai dengan aturan yang terbaru	Peraturan-Peraturan terkait	Inspektorat	Irbn dan Seluruh Pejabat Fungsional	Per Bulan	Per Bulan	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti Dokumentasi berupa Notulen
19	Recruitment Tenaga APIP	Surat Usulan Tenaga APIP	Sekda, Bapedalitbang	BKPSDM	Triwulan IV 2025	Triwulan IV 2025	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti Dokumentasi berupa Notulen
20	Membuat Peta kebutuhan diklat sesuai dengan Kualifikasi APIP	Rapat/Surat Edaran	Inspektorat, BKPSDM	Inspektorat, BKPSDM	Triwulan IV 2025	Triwulan IV 2025	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti Dokumentasi berupa Notulen

**Keterangan**

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan

Kolom c diisi dengan Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian

Kolom d diisi dengan Penyedia Informasi

Kolom e diisi dengan Penerima Informasi

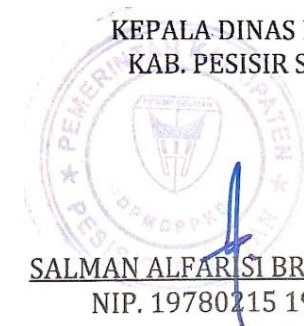
Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan

Kolom g diisi dengan Realisasi Waktu Pelaksanaan

Kolom h diisi dengan Keterangan tambahan

Painan, 13 Maret 2025

**KEPALA DINAS PMDPPKB  
KAB. PESISIR SELATAN**



**SALMAN ALFARISI BRUTU, S.STP., M.Si.**  
NIP. 19780215 199802 1 001

### RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN

Nama Pemda		: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan				
Tahun Penilaian		: 2025				
Tujuan Strategis		: Terwujudnya Birokrasi yang Efisien, Adil dan Berkinerja Tinggi, Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Unggul, Terwujudnya Ketahanan Sosial dan Budaya, Meningkatnya Resiliensi Daerah terhadap Bencana dan Perubahan Iklim				
Urusan Pemerintahan		: Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
No.	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	Revisi Peraturan Bupati tentang pengelolaan risiko	Konfirmasi/pemantauan berkelanjutan	Inspektorat	Triwulan I 2025	Triwulan I 2025	Monitoring telah dilaksanakan, didokumentasikan, dan didistribusikan
2	Evaluasi implementasi komitmen bersama Kepala Perangkat Daerah dalam pencapaian Level 3 Maturitas SPIP	Konfirmasi/pemantauan berkelanjutan	Inspektorat dan Sekda	Per Bulan	Per Bulan	Monitoring telah dilaksanakan, didokumentasikan, dan didistribusikan
3	Mengadakan FGD dan Sosialisasi Hasil Pelatihan LAKIP	Konfirmasi/pemantauan berkelanjutan	Inspektorat, Atasan Langsung	Triwulan I 2025	Triwulan II 2025	Monitoring telah dilaksanakan, didokumentasikan, dan didistribusikan
4	Melakukan Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan evaluasi LAKIP	Sudah ada (pemantauan berkelanjutan)	Sekda	Triwulan I 2025	Triwulan II 2025	Monitoring telah dilaksanakan, didokumentasikan, dan didistribusikan
5	Memberikan teguran dari Sekretaris Daerah terhadap Perangkat Daerah/Tim Anggaran Pemerintah Daerah	Koordinasi dengan Inspektorat Provinsi, BPKP, Kemendagri)	Inspektorat	Triwulan III 2025	Triwulan III 2025	Monitoring telah dilaksanakan, didokumentasikan, dan didistribusikan
6	Komitmen Kepala Perangkat Daerah dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah	Sudah ada (Sekda)	Sekda	Per Triwulan	Per Triwulan	Monitoring telah dilaksanakan, didokumentasikan, dan didistribusikan

No.	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
7	Komitmen Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Inspektorat	Sudah ada (pemantauan berkelanjutan)	Inspektorat dan Sekda	Per Triwulan	Per Triwulan	Monitoring telah dilaksanakan, didokumentasikan, dan didistribusikan
8	Ekspost pada Rapat Koordinasi hasil pengawasan Pemerintah Daerah	Sudah ada (pemantauan berkelanjutan)	Sekda	Triwulan I 2025	Triwulan II 2025	Monitoring telah dilaksanakan, didokumentasikan, dan didistribusikan
9	Komitmen Tim Anggaran Pemerintah Daerah	Sudah ada (pemantauan berkelanjutan)	Inspektorat	2 Kali Per Tahun	2 Kali Per Tahun	Monitoring telah dilaksanakan, didokumentasikan, dan didistribusikan
10	Komitmen seluruh APIP untuk peningkatan kapabilitas	Konfirmasi/pemantauan berkelanjutan	Bupati	Per Tahun	Per Tahun	Monitoring telah dilaksanakan, didokumentasikan, dan didistribusikan
11	Menyiapkan bahan/dokumentasi terkait peningkatan kapabilitas APIP	Konfirmasi/pemantauan berkelanjutan	Inspektorat	Per Tahun	Per Tahun	Monitoring telah dilaksanakan, didokumentasikan, dan didistribusikan
12	Pemberian Sanksi yang lebih tegas pada obrik yang bersangkutan	Konfirmasi/pemantauan berkelanjutan	Inspektorat	Per Bulan	Per Bulan	Monitoring telah dilaksanakan, didokumentasikan, dan didistribusikan
13	Menyusun sistem dan prosedur Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Konfirmasi/pemantauan berkelanjutan	Bupati, Inspektorat	Triwulan I 2025	Triwulan II 2025	Monitoring telah dilaksanakan, didokumentasikan, dan didistribusikan
14	Sosialisasi SOP pada Tim Anggaran Pemerintah Daerah	Sudah ada (inspektorat)	Inspektorat	Per Bulan	Per Bulan	Monitoring telah dilaksanakan, didokumentasikan, dan didistribusikan
15	Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan terhadap masing-masing Tim Monitoring	Sudah ada (inspektorat)	Inspektorat	Per Bulan	Per Bulan	Monitoring telah dilaksanakan, didokumentasikan, dan didistribusikan

No.	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
16	Evaluasi berjenjang terhadap pelaksanaan review	Sudah ada (inspektorat)/pemantauan berkelanjutan	Inspektorat	Per Bulan	Per Bulan	Monitoring telah dilaksanakan, didokumentasikan, dan didistribusikan
17	Melakukan Verifikasi LHP oleh Atasan masing-masing	Sudah ada (atasan langsung)	Atasan Langsung	Per Bulan	Per Bulan	Monitoring telah dilaksanakan, didokumentasikan, dan didistribusikan
18	Memperbaiki Kualitas LHP sesuai dengan aturan yang terbaru	Sudah ada (atasan langsung)/pemantauan berkelanjutan	Atasan Langsung	Per Bulan	Per Bulan	Monitoring telah dilaksanakan, didokumentasikan, dan didistribusikan
19	Recruitment Tenaga APIP	Konfirmasi/pemantauan berkelanjutan	BKPSDM	Triwulan IV 2025	Triwulan IV 2025	Monitoring telah dilaksanakan, didokumentasikan, dan didistribusikan
20	Membuat Peta kebutuhan diklat sesuai dengan Kualifikasi APIP	Konfirmasi/pemantauan berkelanjutan	BKPSDM	Triwulan IV 2025	Triwulan IV 2025	Monitoring telah dilaksanakan, didokumentasikan, dan didistribusikan

**Keterangan**

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan

Kolom c diisi dengan Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan

Kolom d diisi dengan Penanggung Jawab Pemantauan

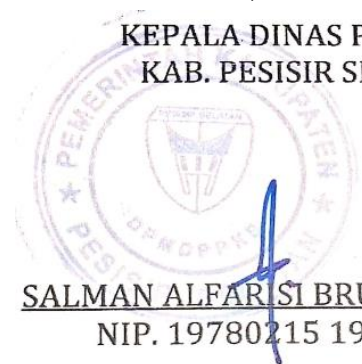
Kolom e diisi dengan Waktu Pelaksanaan Pemantauan

Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan

Kolom g diisi dengan Keterangan tambahan

Painan, 13 Maret 2025

**KEPALA DINAS PMDPPKB  
KAB. PESISIR SELATAN**



**SALMAN ALFARISI BRUTU, S.STP., M.Si.**  
NIP. 19780215 199802 1 001





No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
III	Risiko Operasional OPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan									
18	Data BPJS Kesehatan Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang belum memiliki jaminan kesehatan	ROO.23.13.16.01	Triwulan I 2025	Kurangnya Koordinasi dengan Pemerintahan Nagari	Perencanaan yang kurang tepat	Tidak Terjadi	Evaluasi atas implementasi BPJS Kesehatan	Triwulan I 2025	Februari 2025	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti
19	Proses cross check data dengan BPJS Kesehatan yang membutuhkan waktu lama	ROO.23.13.16.03	Triwulan I 2025	Kurangnya Koordinasi dengan Pemerintahan Nagari	Terhambatnya Pelayanan	Tidak Terjadi	Evaluasi atas implementasi BPJS Kesehatan	Triwulan I 2025	Februari 2025	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti
	Masalah/Risiko Baru: .....									

**Keterangan**

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan tanggal terjadinya risiko pada tahun berjalan

Kolom e diisi dengan penyebab peristiwa risiko saat terjadi pada tahun berjalan

Kolom f diisi dengan dampak peristiwa risiko pada tahun berjalan

Kolom g diisi dengan keterangan tambahan

Painan, 13 Maret 2025



**SALMAN ALFARISI BRUTU, S.STP., M.Si.**  
NIP. 19780215 199802 1 001

CONTOH KODE RISIKO

Tingkat Risiko	Tahun Pelaksanaan Penilaian Risiko	Jenis Risiko	Entitas/OPD yang Menilai	Nomor urut di Entitas/OPD	Kode
RSP	19	01	01	01	RSP.19.01.01.01
RSO	19	02	05	01	RSO.19.02.05.01
ROO	19	03	25	01	ROO.19.03.25.01

Tingkat Risiko, terdiri dari 3 huruf sebagai berikut

RSP Strategis Pemda  
 RSO Strategis OPD  
 ROO Operasional OPD

Jenis Risiko menggambarkan urusan Pemda terdiri dari 2 angka sebagai berikut

- |    |   |    |   |
|----|---|----|---|
| 01 | Pendidikan  | 21 | Persandian  |
| 02 | Kesehatan   | 22 | Kebudayaan  |
| 03 | PU dan Tata Ruang   | 23 | Perpustakaan                                      |
| 04 | Perumahan dan Kawasan Permukiman                          | 24 | Kearsipan   |
| 05 | Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 25 | Kelautan dan perikanan                            |
| 06 | Sosial  | 26 | Pariwisata  |
| 07 | Tenaga Kerja  | 27 | Pertanian   |
| 08 | Pemberdayaan Perempuan & Pelindungan Anak                 | 28 | Kehutanan/Perkebunan                              |
| 09 | Pangan  | 29 | Energi dan sumber daya mineral                    |
| 10 | Pertanahan  | 30 | Perdagangan                                       |
| 11 | Lingkungan Hidup  | 31 | Perindustrian                                     |
| 12 | Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil            | 32 | Transmigrasi                                      |
| 13 | Pemberdayaan masyarakat dan desa                          | 33 | Penyusunan Kebijakan dan Koordinasi Administratif |
| 14 | Pengendalian penduduk dan keluarga berencana              | 34 | Administrasi Kesekretariatan DPRD                 |
| 15 | Perhubungan   | 35 | Pembinaan dan Pengawasan                          |
| 16 | Komunikasi dan informatika                                | 36 | Perencanaan pembangunan, litbang                  |
| 17 | KUKM  | 37 | Keuangan dan Pendapatan                           |
| 18 | Penanaman Modal   | 38 | Kepegawaian dan Pengembangan SDM                  |
| 19 | Kepemudaan dan olah raga                                  | 39 | Bencana   |
| 20 | Statistik   | 40 | Politik   |
|    |   | 99 | Lainnya   |

Entitas yang menilai terdiri dari 2 angka sebagai berikut:

- |    |  |    |  |
|----|--|----|--|
| 01 | Pemda  | 18 | Dinas Perhubungan  |
| 02 | Sekretariat Daerah                                 | 19 | Dinas Komunikasi dan Informatika                                 |
| 03 | Sekretariat DPRD                                   | 20 | Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah              |
| 04 | Inspektorat Daerah                                 | 21 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu |
| 05 | Dinas Pendidikan                                   | 22 | Dinas Pariwisata   |
| 06 | Dinas Kesehatan                                    | 23 | Dinas Pemuda dan Olah Raga                                       |
| 07 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang            | 24 | Dinas Perindustrian  |
| 08 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman      | 25 | Dinas Perpustakaan dan kearsipan                                 |
| 09 | Satuan Polisi Pamong Praja                         | 26 | Dinas Pertanian  |
| 10 | Dinas Sosial                                       | 27 | Dinas Perikanan  |
| 11 | Dinas Ketenagakerjaan                              | 28 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah                             |
| 12 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 29 | Badan Pengelolaan keuangan, Pendapatan an Aset Daerah            |
| 13 | Dinas Ketahanan Pangan                             | 30 | Badan Kepegawaian Daerah   |
| 14 | Dinas Lingkungan Hidup                             | 31 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                              |
| 15 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil            | 32 | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik                               |
| 16 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa             | 33 | RSUD   |
| 17 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 99 | Lainnya  |